KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

Menjaga Peran APBN Tetap Optimal sebagai *Shock Absorber* dalam Menghadapi Ketidakpastian Global yang Eskalatif

Edisi Oktober 2022

Scan dan Unduh
APBN KITA

foto: istock

“Kewaspadaan akan terus kita tingkatkan tanpa menghilangkan optimisme pemulihan ekonomi yang memang terlihat cukup baik bahkan sampai ke daerah-daerah.”

Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	17
Perkembangan Ekonomi Makro	21
Laporan Khusus	24
Penerimaan Pajak	47
Penerimaan Bea dan Cukai	57
Penerimaan Negara Bukan Pajak	63
Belanja Pemerintah Pusat	71
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	79
Pembiayaan Utang	85

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita

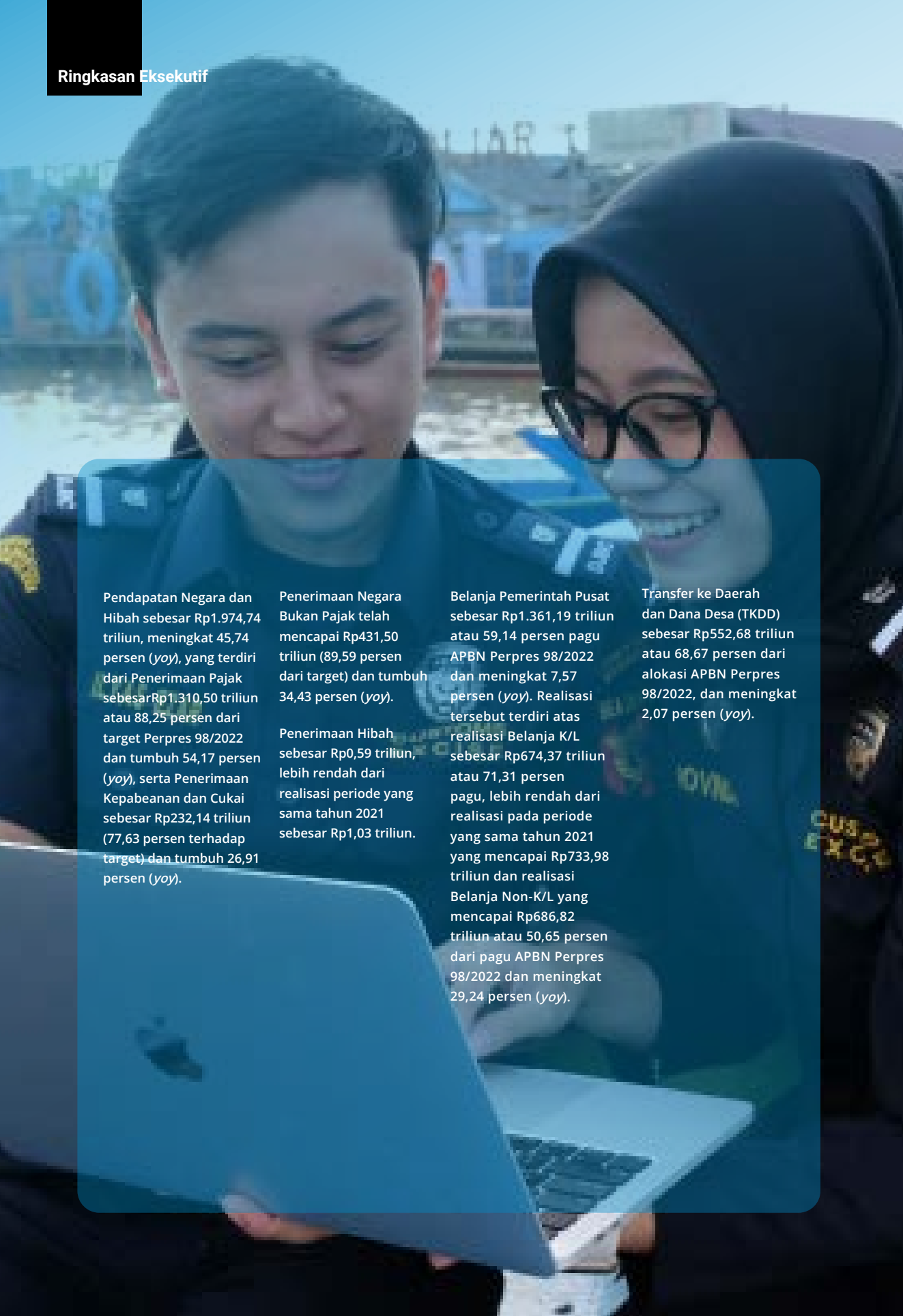

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.974,74 triliun, meningkat 45,74 persen (*yoy*), yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesarRp1.310,50 triliun atau 88,25 persen dari target Perpres 98/2022 dan tumbuh 54,17 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp232,14 triliun (77,63 persen terhadap target) dan tumbuh 26,91 persen (*yoy*).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp431,50 triliun (89,59 persen dari target) dan tumbuh 34,43 persen (*yoy*).

Penerimaan Hibah sebesar Rp0,59 triliun, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,03 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.361,19 triliun atau 59,14 persen pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 7,57 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp674,37 triliun atau 71,31 persen pagu, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp733,98 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp686,82 triliun atau 50,65 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 29,24 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp552,68 triliun atau 68,67 persen dari alokasi APBN Perpres 98/2022, dan meningkat 2,07 persen (*yoy*).

Ringkasan Eksekutif

Prospek ekonomi global mengalami penurunan yang dipengaruhi terutama oleh adanya inflasi yang semakin persisten, pengetatan kebijakan moneter, perang di Ukraina. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) rilis Oktober 2022 memproyeksi *outlook* pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2 persen di 2022 dan 2,7 persen di tahun 2023. Sementara proyeksi inflasi global sebesar 8,8 persen di 2022 dan 6,5 persen di 2023. Perkembangan risiko ekonomi global telah mengganggu aktivitas manufaktur global yang digambarkan oleh PMI Manufaktur global berada pada level kontraksi pada September 2022 setelah lebih 2 tahun terakhir berada pada level ekspansi. Perkembangan sektor keuangan global juga mengalami tekanan yang diperlihatkan adanya kenaikan imbal hasil dan penguatan dolar Amerika Serikat akibat

pengetatan kebijakan moneter. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional, namun masih tetap terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan *peer countries*. Pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2022 tercatat mencapai Rp1.974,74 triliun atau 87,14 persen terhadap target pada APBN Perpres 98/2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp619,74 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 45,74 persen (*yoy*). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.542,64 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp431,50 triliun, dan Hibah Rp0,59 triliun. Berdasarkan kinerja pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 49,34 persen (*yoy*) dan 34,43 persen (*yoy*), sedangkan penerimaan Hibah realisasinya lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu. Lebih lanjut, capaian masing-masing penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah terhadap target pada APBN 2022 berturut-turut 86,47 persen, 89,59 persen, dan 101,36 persen.

Realisasi penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir September 2022 bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp1.310,50 triliun (78,291 persen terhadap pagu APBN Perpres 98/2022), atau tumbuh 54,17 persen (*yoy*), dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp232,14 triliun (77,63 persen terhadap pagu APBN Perpres 98/2022), atau tumbuh 26,91 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan Pajak didukung oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang tumbuh 63,06 persen (*yoy*) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/ PPnBM) tumbuh sebesar 44,78 persen (*yoy*). Secara nominal, lebih dari 80 persen capaian PPh Nonmigas ditopang oleh realisasi dari empat komponen penerimaan terbesarnya yaitu PPh 25/29 Badan, PPh Final, PPh 21, dan PPh 22 Impor dengan realisasi masing-masing sebesar Rp274,68 triliun, Rp135,85 triliun, Rp132,19 triliun, dan Rp56,52 triliun. Realisasi

empat komponen tersebut tumbuh berturut-turut 115,69 persen (*yoy*), 68,09 persen (*yoy*), 21,36 persen (*yoy*), dan 123,52 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi merupakan hasil dari semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik serta keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir September 2022. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan diantaranya *tapering* relaksasi angsuran PPh 25 dan dampak penerimaan PPS. Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/ PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir September 2022, realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp287,85 triliun atau tumbuh 39,78 persen (*yoy*) yang didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian. Selain itu, kenaikan tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022 mulai berdampak pada bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, realisasi PPN Impor mencapai Rp197,65 triliun, atau tumbuh signifikan sebesar 48,18 persen (*yoy*), dimana kinerjanya meningkat seiring meningkatnya kegiatan impor.

Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal terdiri dari penerimaan Cukai Rp158,80 triliun, Bea Masuk (BM) Rp36,29 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp37,04 triliun. Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tersebut tumbuh *double digits,* yaitu berturut-turut 19,61 persen (*yoy*), 31,56 persen (*yoy*), dan 64,17 persen (*yoy*). Realisasi penerimaan Cukai didukung utamanya oleh penerimaan komponen Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh 19,27 persen (*yoy*) yang kontribusinya sebesar 65,93 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Kinerja CHT dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif cukai CHT serta limpahan penerimaan dari tahun 2021. Pada komponen Perdagangan Internasional, BM realisasinya terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional karena produksi dan konsumsi yang meningkat. Sementara itu, Bea Keluar didukung oleh faktor peningkatan harga komoditas dan volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya, serta mineral tembaga.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp431,50 triliun (89,59 persen dari target APBN Perpres 98/2022), atau tumbuh positif 34,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*yoy*). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBP Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp179,63 triliun atau tumbuh positif sebesar 85,39 persen (*yoy*). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan *Indonesia Crude Price* (ICP) dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Sejalan dengan PNBP SDA, PNBP yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp40,60 triliun atau tumbuh positif 37,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya bersumber dari kenaikan setoran dividen BUMN Bank Himbara. Selanjutnya dari sisi PNBP Lainnya, realisasi hingga akhir September 2022 mencapai Rp143,77 triliun atau tumbuh positif sebesar 41,14 persen (*yoy*). Meningkatnya capaian PNBP Lainnya antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Layanan Administrasi Hukum, Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing, dan Pendapatan Layanan Pertanahan. Sedangkan di sisi lain, PNBP yang bersumber dari pendapatan BLU masih mengalami pertumbuhan negatif, tercatat hingga akhir September 2022 capaian realisasinya sebesar Rp67,51 triliun atau tumbuh negatif sebesar 27,20 persen (*yoy*). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp1.913,87 triliun (61,61 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022), atau meningkat sebesar 5,92 persen dari tahun sebelumnya (*yoy*). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.361,19 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 552,68 triliun**.** Secara rinci, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 September 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 7,57 persen (*yoy*), utamanya dipengaruhi

meningkatnya realisasi Subsidi yang tumbuh 26,67 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga didorong pembayaran kompensasi BBM dan listrik dalam rangka memastikan ketersediaan energi dalam negeri yang terjangkau masyarakat. Realisasi belanja Bantuan Sosial hingga September 2022 telah mencapai Rp116,19 triliun atau 78,81 persen dari pagu APBN Perpres No.98 Tahun 2022, menjadi bantalan dalam melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Sementara itu, realisasi belanja barang dan belanja modal hingga September 2022 masing-masing mengalami kontraksi sebesar 17,60 persen (*yoy*) dan 10,15 persen (*yoy*). Penurunan realisasi belanja barang utamanya dikarenakan menurunnya belanja barang terkait PC-PEN seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang semakin terkendali, sedangkan kontraksi realisasi belanja modal tahun 2022 dipengaruhi adanya relaksasi pembayaran proyek infrastruktur yang selesai di tahun 2020 dibayarkan pada awal tahun 2021. Namun demikian, realisasi belanja modal hingga September 2022 secara nominal tercatat masih lebih tinggi dari level pra-pandemi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp167,20 triliun atau 58,94 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022), atau meningkat 26,67 persen (*yoy*). Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp123,80 triliun (naik 40,30 persen secara *yoy*) dan subsidi nonenergi sebesar Rp43,40 triliun (turun 0,82 persen secara *yoy*).

Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp87,97 triliun atau 58,90 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, atau meningkat 75,26 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 55,37 persen (*yoy*) selama periode Januari-September 2022. Selain itu, hingga Agustus 2022, juga terjadi kenaikan volume LPG sebesar 4,35 persen (*yoy*). Pada tahun 2021, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg periode Januari-Agustus sebesar 4,92 juta MT, sedangkan pada tahun 2022 periode yang sama mencapai 5,13 juta MT.

Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp35,83 triliun atau 60,15 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 5,82 persen.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-September 2022 yang sebesar Rp43,40 triliun, atau 58,08 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, masih didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp22,80 triliun atau 52,51 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Untuk realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp13,80 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu 31,78 persen. Realisasi subsidi kredit program sebagai kontributor utama realisasi subsidi nonenergi tumbuh positif sebesar 13,52 persen (*yoy*). Secara keseluruhan realisasi subsidi nonenergi mengalami penurunan sebesar 0,82 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (*yoy*). Penurunan ini diantaranya dipengaruhi oleh menurunnya penyaluran volume pupuk bersubsidi selama periode Januari-September yaitu dari sebanyak 5,60 juta ton pada 2021 menjadi sebanyak 5,54 juta ton pada 2022. Untuk pupuk organik cair juga mengalami penurunan volume penyaluran dari tersalur sebanyak 124,96 ribu liter pada tahun 2021 menjadi tersalur hanya 67,96 ribu liter pada 2022 atau mengalami penurunan sebesar 45,62 persen (*yoy*). Selain itu, menurunnya realisasi subsidi nonenergi juga disebabkan oleh beberapa realisasi jenis subsidi nonenergi lainnya diantaranya seperti subsidi pajak yang menurun 27,40 persen (*yoy*) dan subsidi PSO yang juga menurun sebesar 7,68 persen (*yoy*).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir September tahun 2022 mencapai Rp552,68 triliun atau 68,67 persen dari pagu Perpres No. 98 tahun 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp499,56 triliun (67,80 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022) dan Dana Desa Rp53,12 triliun (78,12 persen dari pagu Perpres

98/2022). Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp11,21 triliun atau meningkat 2,07 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Realisasi TKD sampai dengan akhir September 2022 lebih tinggi Rp8,25 triliun atau meningkat sebesar 1,68 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2021. Secara umum, pertumbuhan realisasi TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran. Realisasi TKD tersebut diantaranya adalah: (i) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp309,37 triliun, lebih tinggi Rp3,09 triliun (1,01 persen *yoy*), (ii) realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp64,00 triliun, lebih tinggi Rp3,95 triliun (6,58 persen *yoy*) (iii), realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp25,39 triliun, lebih tinggi Rp4,85 triliun (23,60 persen *yoy*), dan (iv) realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp12,02 triliun, lebih tinggi Rp5,12 triliun (74,14 persen *yoy*).

Dana Insentif Daerah (DID) dan DAK Nonfisik tumbuh negatif dibandingkan tahun 2021. Realisasi DID Rp4,10 triliun atau lebih rendah Rp4,18 triliun (minus 50,5 persen *yoy*) karena pagu total yang lebih rendah di tahun 2022. Realisasi DAK Nonfisik mencapai Rp84,68 triliun atau lebih rendah Rp4,57 triliun (minus 5,12 persen *yoy*) yang dipicu oleh penurunan kinerja penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp4,51 triliun (minus 11,36 persen yoy) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,18 triliun (minus 3,18 persen yoy). Sementara itu, realisasi Dana Desa lebih tinggi Rp2,96 triliun atau tumbuh 5,90 persen (*yoy*) sejalan dengan peningkatan kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat penyaluran.

Defisit APBN 2022 ditargetkan sebesar 4,50 persen, lebih rendah daripada target tahun 2020 dan 2021. Target besaran defisit ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit fiskal kembali di bawah 3 persen

terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp840,23 triliun, terutama diperoleh dari pembiayaan utang sebesar Rp943,69 triliun sesuai pagu APBN 2022. **Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir September 2022, terdapat surplus anggaran sebesar Rp60,86 triliun atau sekitar 0,33 persen terhadap PDB (APBN Perpres 98/2022)**. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir September 2022 ini mencapai Rp429,83 triliun (51,20 persen dari Pagu APBN 2022). Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir September 2022 mencapai Rp478,90 triliun (50,70 persen dari Pagu APBN 2022). Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp470,87 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp8,02 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2,55 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp5,47 triliun. Hingga akhir September 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp3,95 triliun dan juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp1,40 triliun. Pada sisi lain, Pinjaman Luar Negeri (Bruto) ditarik sebesar Rp62,96 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp57,49 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp51,99 triliun untuk Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp44,00 triliun, Investasi kepada BUMN sebesar negatif Rp2,00 triliun, Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp8,01 triliun dan Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp14 triliun. Sementara itu, Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir September 2022 terealisasi sebesar Rp2,38 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana untuk Pembiayaan Lainnya sebesar Rp550,30 miliar hingga akhir September 2022.

Halaman Ini Dikosongkan

Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 30 September 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,33 persen terhadap PDB (periode yang sama pada tahun 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar 2,66 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.974,74 triliun, meningkat 45,74 persen (*yoy*). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,87 triliun atau 61,61 persen terhadap pagu APBN Perpres 98/2022 dan tumbuh 5,92 persen (*yoy*).

Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp1.542,64 triliun atau 86,47 persen dari target Perpres 98/2022 dan tumbuh 49,34 persen (*yoy*). Realisasi ini terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.310,50 triliun atau 88,25 persen target dan tumbuh 54,17 persen (*yoy*) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp232,14 triliun atau 77,63 persen target dan tumbuh 26,91 persen (*yoy*).

Realisasi APBN s.d 30 September 2022

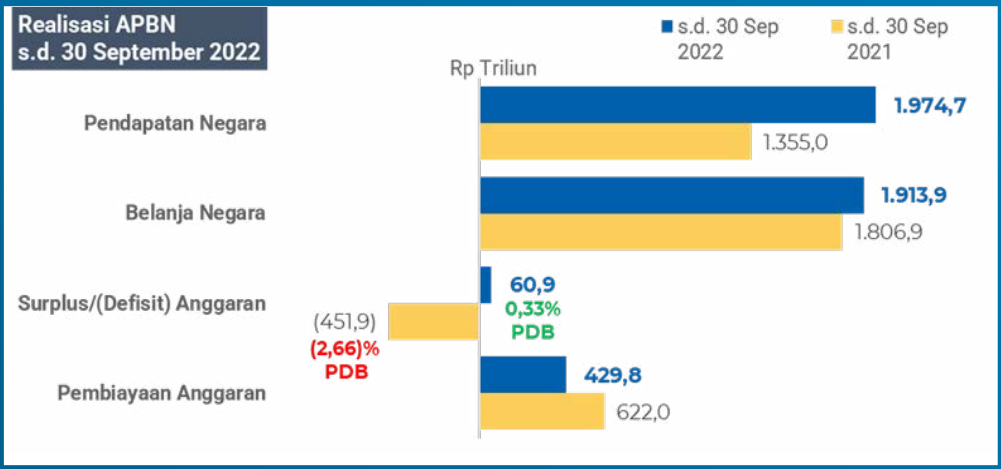

Realisasi APBN s.d 30 September 2022

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 30 September	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 98/2002	Realisasi s.d. 30 September	% thd Perpres 98/2002	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.743,65**	**1.354,99**	**77,71**	**16,81**	**2.266,20**	**1.974,74**	**87,14**	**45,74**
I. Pendapatan Dalam Negeri	**1.742,75**	**1.353,96**	**77,69**	**17,30**	**2.265,62**	**1.974,15**	**87,14**	**45,81**
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.032,98	71,51	15,75	1.783,99	1.542,64	86,47	49,34
a. Pajak	1.229,58	850,06	69,13	13,25	1.484,96	1.310,50	88,25	54,17
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	182,92	85,09	28,98	299,03	232,14	77,63	26,91
2. PNBP	298,20	320,98	107,64	22,59	481,63	431,50	89,59	34,43
II. Penerimaan Hibah	**0,90**	**1,03**	**113,83**	**(82,00)**	**0,58**	**0,59**	**101,37**	**(42,80)**
B. BELANJA NEGARA	**2.750,03**	**1.806,87**	**65,70**	**(1,87)**	**3.106,43**	**1.913,87**	**61,61**	**5,92**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**1.954,55**	**1.265,40**	**64,74**	**4,44**	**2.301,64**	**1.361,19**	**59,14**	**7,57**
1. Belanja K/L	1.031,96	733,98	71,13	16,11	945,75	674,37	71,31	(8,12)
2. Belanja Non K/L	922,59	531,42	57,60	(8,29)	1.355,89	686,82	50,65	29,24
II. Transfer Ke Daerah	**795,48**	**541,47**	**68,07**	**(14,01)**	**804,78**	**552,68**	**68,67**	**2,07**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(633,12)**	**(198,23)**	**31,31**	**(55,61)**	**(434,36)**	**339,35**	**(78,13)**	**271,19**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	**(1.006,38)**	**(451,88)**	**44,90**	**(33,68)**	**(840,23)**	**60,86**	**(7,24)**	**113,47**
% Surplus/(Defisit) thd PDB	***(5,70)***	***(2,66)***			***(4,50)***	***0,33***		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**1.006,38**	**621,99**	**61,81**	**(20,72)**	**840,23**	**429,83**	**51,16**	**(30,89)**
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	**-**	**170,11**			**-**	**490,70**		

dalam Triliun Rupiah

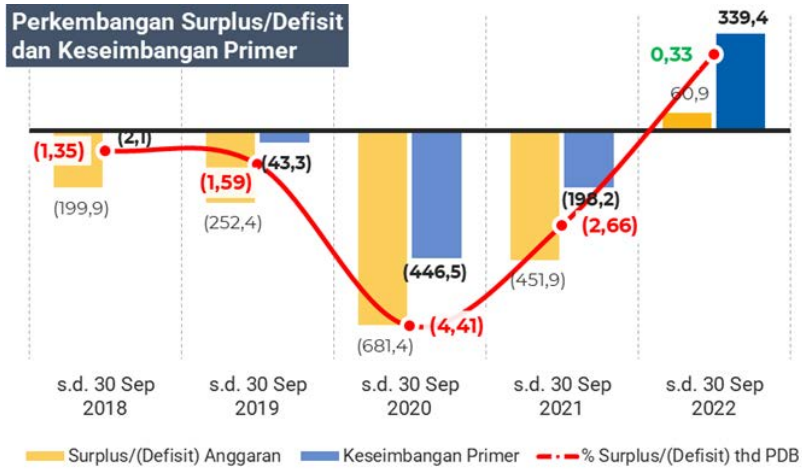

Realisasi PNBP yang telah mencapai Rp431,50 triliun atau 89,59 persen target dan tumbuh 34,43 persen (*yoy*).

Realisasi Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp0,59 triliun, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,03 triliun.

Belanja Negara yang telah terealisasi sebesar 61,61 persen dari pagu Perpres 98/2022, terdiri atas:

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.361,19 triliun atau 59,14 persen pagu Perpres 98/2022 dan meningkat 7,57 persen (*yoy*), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp674,37 triliun atau 71,31 persen pagu (lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp733,98 triliun) dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp686,82 triliun atau 50,65 persen pagu dan meningkat 29,24 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah sebesar Rp552,68 triliun atau 68,67 persen dari alokasi, meningkat 2,07 persen (*yoy*)

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 30 September 2022 mengalami surplus sebesar Rp60,86 triliun (0,33 persen PDB) dan Keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp339,35 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp429,83 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp490,70 triliun.

Perkembangan Ekonomi Makro

Proses penguatan pemulihan diperkirakan akan tetap berlanjut di Kuartal III 2022. Kelanjutan pertumbuhan ekonomi nasional akan terus berlangsung melanjutkan pertumbuhan PDB sebesar 5,23 persen (*yoy*) hingga Semester I 2022. Perkembangan *leading indicators* ekonomi di September 2022 terus memperlihatkan prospek perkembangan ekonomi yang positif. *Purchasing Managers' Index* (PMI) sektor Manufaktur nasional tetap berada pada level ekspansi dan mengalami peningkatan signifikan. Tingkat belanja masyarakat yang dilihat dari *Mandiri Spending Index* masih tetap stabil pada tingkat yang masih relatif tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen di September 2022 tetap terjaga yang mengindikasikan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kedepan.

Stabilitas pasar keuangan nasional mengalami tekanan namun relatif moderat, akibat kondisi tekanan likuiditas keuangan global. Pasar saham domestik kembali menguat melewati level psikologis, yakni tercatat 7.0177,7 pada 21 Oktober 2022. Nilai tukar

Rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dollar index dan tercatat sebesar Rp15.610 per USD pada 21 Oktober 2022. Namun, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah relatif moderat dibandingkan beberapa negara lainnya, seperti India, Turkey, dan Philipina. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 9,4 persen dibandingkan levelnya diawal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 21 Oktober 2022 adalah sebesar Rp14.703 per USD. Tekanan terhadap inflasi masih terus berlanjut, namun masih relatif moderat. Pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17 persen (*mtm*) terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM. Sehingga, Inflasi pada bulan September 2022 tercatat sebesar 5,95 persen (*yoy*) atau 4,75 persen (*ytd*). Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir September 2022 tetap berada level yang kuat, tercatat sebesar USD130,84 miliar.

Aktivitas pariwisata nasional terus menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke dalam negeri. Peningkatan aktivitas sektor pariwisata ini akan mendorong aktivitas sektor pendukung lainya seperti, makanan dan minuman, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Agustus 2022 meningkat tajam mencapai 510,25 ribu kunjungan, dibandingkan dengan kunjungan Agustus 2021 yang hanya tercatat sebesar 1,7 ribu kunjungan. Hingga Agustus 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 1,73 juta kunjungan, meningkat tajam dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021 yang hanya tercatat sebesar 81,3 ribu kunjungan. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 47,38 persen pada Agustus 2022 naik sebesar 22,31 poin dibandingkan kondisi Agustus 2021.

Halaman Ini Dikosongkan

Menjaring Pajak Industri Teknologi Keuangan Indonesia

Berdasarkan data transaksi elektronik yang dihimpun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama 2021 terdapat 5,4 miliar transaksi uang elektronik di Indonesia dengan nilai mencapai Rp239 triliun. Melihat tren kenaikannya yang konsisten masih terjadi hingga pertengahan tahun 2022, tak heran bila pemerintah memberikan perhatian khusus bagi industri teknologi keuangan yang berkembang pesat di Indonesia. Apalagi, pesatnya perkembangan itu turut menciptakan transaksi jasa keuangan yang baru atau modifikasi transaksi jasa sebelumnya.

Sebagai contoh pada *peer-to-peer (P2P) lending*, yaitu layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Kelebihan layanan ini adalah menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman

secara langsung kepada debitur dengan pengembalian keuntungan lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan bila mengajukan ke lembaga keuangan konvensional.

Kelebihan ini menyebabkan jasa teknologi keuangan *P2P lending* sangat menarik sehingga mampu menggaet banyak pelanggan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat akumulasi kredit industri ini hingga akhir tahun lalu mencapai Rp295,85 triliun. Data ini meningkat 89,77 persen dibandingkan tahun 2020 secara tahunan (*year on year*).

Perkembangan teknologi digital terakselerasi sangat cepat terutama selama masa pandemi. Bahkan, diperkirakan potensi ekonomi digital di Indonesia tumbuh delapan kali lipat pada 2030 menjadi Rp4.531 triliun. Agar potensi industri ini dapat terjaring dengan baik, diperlukan ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus pengenaan pajak atas teknologi keuangan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak lain dalam hal ini adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi. Selanjutnya, tata cara penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pada 30 Maret 2022, terbit PMK-69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi dalam penyelenggaraan teknologi finansial, mengatur tentang penunjukan pemotong dan pengenaan PPh atas penghasilan sehubungan dengan transaksi layanan pinjam meminjam, serta

perlakuan PPN atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial.

Kesetaraan Perlakuan Pajak

Secara prinsip, terdapat kesetaraan dalam perlakuan perpajakan atas penyelenggaraan jasa teknologi finansial dengan konvensional. PMK-69/PMK.03/2022 mengatur lebih detail terkait PPh transaksi layanan pinjam meminjam yang menunjuk penyelenggara layanan untuk memotong PPh Pasal 23 atau Pasal 26 atas penghasilan bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman.

Atas pemotongan tersebut, penyelenggara layanan harus membuat Bukti Pemotongan PPh dan menyerahkannya ke pemberi pinjaman; wajib menyetorkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong ke Kas Negara; dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh. Dengan mekanisme ini, pemajakan atas penghasilan yang diterima pemberi pinjaman melalui *platform P2P lending* akan lebih mudah dilakukan dibanding bila masing-masing pemberi pinjaman yang melakukan pemotongan PPh.

Potensi PPN pun tidak luput dijaring. Secara prinsip, tidak ada objek pajak baru dalam ekonomi digital, yang berbeda hanya cara bertransaksi. Misalnya bila dalam UU PPN jasa asuransi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang bebas PPN, demikian pula dengan jasa asuransi melalui *platform* dibebaskan dari PPN.

Jasa peminjaman/penempatan dana oleh kreditur kepada debitur melalui *platform P2P lending* juga merupakan JKP yang dibebaskan dari PPN. Demikian pula pada penyelenggaraan pengelolaan investasi dimana jasa menempatkan dana/jasa pembiayaan oleh pemodal bukan JKP. Adapun jasa penyediaan *platform,* penyediaan sarana atau sistem pembayarannya merupakan JKP.

Untuk layanan penyediaan jasa pembayaran seperti dompet elektronik, *payment gateway*, layanan *switching*, kliring, penyelesaian akhir, transfer dana, yang menjadi objek PPN adalah layanan penyelenggaraan teknologi keuangannya. PPN dipungut atas *fee*/komisi, *merchant discount rate*, atau imbalan lainnya. Adapun uang dalam media elektronik termasuk poin bonus, poin *top up*, poin *reward*, dan poin *loyalty* bukan objek PPN.

Untuk penyelenggaraan penyelesaian transaksi *settlement* investasi, layanan pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, PPN dipungut atas *fee,* komisi, atau imbalan lainnya atas penyediaan sarana atau fasilitas. Dengan pengaturan PMK-69/PMK.03/2022 terhadap prinsip pokok tersebut, niscaya pemajakan atas industri teknologi keuangan yang terus berkembang di masa depan akan lebih mudah dilakukan tanpa takut kehilangan momentumnya.

Gim Taxman untuk Edukasi Manfaat APBN

Menurut teori bonus demografi, semakin sedikit jumlah usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Teori ini menggambarkan hubungan antara dinamika kependudukan dan ekonomi.

Berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada kurun 2030-2040, artinya bahwa pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia nonproduktif. BPS memperkirakan usia produktif setidaknya sekitar 64 persen dari total penduduk yang diproyeksikan berjumlah 297 juta jiwa.

Prediksi BPS jatuh lebih awal, saat ini Indonesia tengah berada pada periode bonus demografi. Data statistik

sensus 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia sebagian besar didominasi oleh generasi Z, yang selanjutnya lebih familier disebut dengan Gen Z, yakni *generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012* sebanyak 27,94 persen atau 74,93 juta jiwa.

Gen Z memiliki karakteristik selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Generasi ini sudah terbiasa memegang gawai sejak usia dini. Pengenalan teknologi dan dunia maya ini sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka, sehingga untuk melakukan pendekatan edukasi perpajakan pada generasi ini tentunya membutuhkan media yang berhubungan dengan teknologi. Edukasi perpajakan bagi mereka harus dikemas dengan menarik.

Gim edukasi merupakan media pembelajaran baru yang dipercayai dapat meningkatkan motivasi Gen Z dalam belajar dan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan bagi kebiasaan Gen Z dan perubahan yang tampak paling menonjol adalah bagaimana cara mereka belajar. Cara belajar konvensional dari buku dengan pendampingan seorang pendidik secara tatap muka langsung di kelas secara

perlahan tergeser dengan metode pembelajaran jarak jauh (*daring*) menggunakan peralatan berupa laptop atau gawai.

Mereka lebih sering mengakses berbagai informasi melalui YouTube, SnapChat, dan media sosial sejenisnya. Ini adalah kecenderungan umum yang ditemui di mana pun dan sudah terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Ketika pembelajaran dilakukan secara *daring* dengan minim interaksi, maka kebosanan belajar akan dirasakan oleh mereka. Sehingga muncul istilah *nano learning* dari hasil kajian para praktisi dalam menangkap momentum cara belajar Gen Z di masa pandemi.

Nano learning merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan tertentu melalui aktivitas yang menarik dalam durasi waktu pendek dengan bantuan teknologi. Dengan konsep *nano learning*, aktivitas dikemas dalam potongan-potongan aktivitas yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri. Aktivitas ini dikemas dalam format media teks, animasi, video, film pendek, simulasi, kuis, gim, atau gabungan dari semua itu.

Cara belajar anak selama masa pandemi berhasil membentuk karakteristik generasi Z lebih familier menggunakan teknologi sebagai media mereka dalam mengakses berbagai informasi. Pendekatan edukasi perpajakan melalui aspek teknologi dapat dilakukan dengan memperkenalkan pajak melalui muatan materi edukasi perpajakan yang disampaikan dalam bentuk visual atau audio visual.

Gim Taxman

Kementerian Keuangan menangkap fenomena perkembangan generasi Z terhadap teknologi melalui gim Taxman. Gim itu merupakan sarana edukasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak bagi generasi mendatang melalui pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang tersaji dalam gim Taxman dikemas melalui video animasi yang dilengkapi dengan informasi-informasi melalui kotak dialog.

Jika Malaysia memiliki aplikasi gim pajaknya yang interaktif sebagai upaya dalam memberikan edukasi perpajakan kepada generasi mendatang, maka Kementerian Keuangan memiliki gim Taxman sebagai manuver edukasi perpajakan bagi generasi mendatang. Langkah ini diprediksi sebagai peluang besar dalam membentuk

kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Gim Taxman merupakan gim edukasi perpajakan yang dapat diakses oleh siapa pun melalui situs web https://edukasi.pajak.go.id/. Kementerian Keuangan melalui DJP menyediakan sebelas gim dalam situs web tersebut dan gim Taxman adalah salah satunya.

Karakter dalam gim ini hanya satu, yaitu seorang anak laki-laki. Gim ini kurang lebih menggambarkan fungsi pajak dalam hal pengadaan infrastruktur. Ada tiga permasalahan yang ditemui oleh karakter dalam gim tersebut. Permasalahan pertama, yakni jalan terhalang oleh batu besar sehingga tidak dapat dilalui oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Kedua, tidak tersedianya jembatan sebagai fasilitas penyambung mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketiga, tidak tersedianya stasiun kereta api, sehingga turis asing yang berkunjung ke kota kesulitan melakukan mobilitas. Ketiga permasalahan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan cara memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Gim ini dikemas dalam animasi sederhana yang dapat dengan mudah dimainkan dan dipahami oleh generasi Z melalui instruksi-instruksi yang tersaji dalam kotak dialog. Ketiga permasalahan yang dihadirkan dalam gim tersebut mampu merepresentasikan fungsi pajak secara jelas. Dalam gim Taxman, pajak digambarkan sebagai salah satu instrumen APBN yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, yakni untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

Selain untuk edukasi perpajakan, pada dasarnya gim Taxman ini sebagai sarana edukasi mengenalkan manfaat APBN kepada Gen Z, generasi melek teknologi informasi dan patuh pajak.

Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan *High Speed Crafts*

Batam, 23 September 2022 – Jalankan fungsi pengawasan dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya ke daerah pabean Indonesia, Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal menggunakan *high speed crafts* (HSC) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menjelaskan kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020. Petugas patroli laut Bea Cukai menindak kapal layar motor (KLM) Pratama yang mengangkut sekitar 51.400.000 batang rokok impor ilegal merek Luffman yang dibawa dari Vietnam menuju Perairan Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia. Para pelaku diketahui melakukan

pembongkaran muatan di tengah laut (*ship to ship*), dan memindahkan muatan ke beberapa HSC yang rencananya akan dibawa ke beberapa lokasi di wilayah Pesisir Timur Sumatera.

"Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau terhadap penyelundupan rokok impor ilegal tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menetapkan lima belas orang tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 102 huruf (a) dan/atau Pasal 102 huruf (b) UU Kepabeanan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus, Bea Cukai melalui Satgas TPPU Bea Cukai berkoordinasi dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, Bais TNI, Polisi Militer, TNI AD, dan instansi terkait lainnya melakukan pengembangan penyidikan. Hasilnya pada bulan September 2021, kembali ditetapkan seorang tersangka berinisial LHD yang terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 102 huruf (a) dan/atau Pasal 102 huruf (b) UU Kepabeanan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang periode tahun 2019 s.d. 2020.

"Pada akhir Agustus 2022 lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P-21),

berkas perkara tersangka LHD ditetapkan sebagai kasus TPPU terbesar yang proses penyidikannya dilakukan oleh Bea Cukai, dengan potensi kerugian pendapatan negara mencapai satu triliun rupiah," lanjut Askolani.

Saat ini, Satgas TPPU Bea Cukai telah berhasil melakukan ***asset recovery*** berupa 1 unit KLM Pratama GT210, 1 unit mobil, 1 unit kapal giant HSC 38 meter mesin MAN 3x1.800 HP, 5 unit HSC, 3 unit speedboat, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura, dengan total nilai barang dan uang tunai mencapai Rp44,6 miliar.

Askolani menambahkan bahwa penyelundupan menggunakan HSC secara ***ship to ship*** awalnya terbatas di wilayah Batam dan Kepulauan Riau, tetapi saat ini HSC dapat langsung berlayar menuju daratan Sumatera atau Jakarta tanpa pengisian BBM. Bahkan telah terdeteksi juga di wilayah Aceh, Riau, Kalimantan Bagian Barat, hingga Kalimantan Utara. Di wilayah perairan Selat Singapura pun frekuensi pelintasannya meningkat, dari 3-6 kali deteksi pelintasan, menjadi 10-14 kali deteksi pelintasan per minggu. HSC sendiri merupakan kapal dengan konstruksi fiber yang dilengkapi 4-8 unit mesin berkecepatan tinggi dengan desain *open-top* yang dirancang khusus untuk penyelundupan. Tidak memiliki surat perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, HSC kerap digunakan untuk melakukan penyelundupan barang-barang bersifat *high value goods*, seperti narkotika, rokok dan minuman beralkohol, benih bening lobster, pasir timah, telepon seluler, dan barang elektronik lainnya, serta pekerja migran ilegal.

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Askolani menegaskan bahwa perlu adanya koordinasi *high-level* untuk penerbitan regulasi larangan HSC oleh kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta melibatkan Kementerian Luar Negeri. Sanksi tegas pun harus diberikan atas kewajiban penggunaan *automatic identification system* (AIS).

"Saat regulasi sudah terbentuk, Bea Cukai bersama APH lainnya siap berkoordinasi dan berkomitmen dalam pelaksanaannya di lapangan. Tidak hanya untuk meningkatkan pengawasan atas penyelundupan TPPU, koordinasi yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya ke wilayah pabean Indonesia," pungkas Askolani.

Lewat Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya, Bea Cukai Tangkap Kapal Pengangkut BBM Ilegal

Batam, Pengawasan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas membutuhkan upaya ekstra serta sinergi antarinstansi. Bea Cukai sebagai salah satu aparat penegak hukum secara konsisten melakukan pengawasan perairan Indonesia lewat operasi laut terpadu, salah satunya Jaring Sriwijaya. Lewat operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya 2022, Bea Cukai berhasil menggagalkan empat belas kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia bagian barat.

Salah satu penindakan yang signifikan dalam operasi tersebut adalah penangkapan sebuah kapal tanker di perairan Pulau Karimun Besar, Kepulauan Riau yang kedapatan mengangkut muatan minyak solar *High Speed Diesel* (HSD) dengan total 629,3 KL. Penangkapan tersebut merupakan hasil dari operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya yang dilakukan oleh

Bea Cukai Batam dan Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengungkapkan modus yang digunakan kapal MT. Zakira yang ditangkap oleh satuan tugas Bea Cukai pada Minggu (25/09). "Modus yang digunakan adalah dengan memuat bahan bakar minyak jenis solar secara *ship-to-ship* (STS) dari beberapa kapal di luar daerah pabean, kemudian masuk ke daerah pabean tanpa dilengkapi manifes," ungkap Askolani.

Penindakan berawal dari informasi yang diterima petugas Bea Cukai tentang adanya modus penyelundupan bahan bakar minyak dengan cara STS antarkapal sambil berjalan lambat atau berhenti mengapung di perairan Selat Singapura dan perairan Timur Johor, Malaysia. Pada hari Selasa, (20/09), Satgas Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 7005 mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal tanker dari Tanjung Uncang yang diduga bermuatan minyak menuju keluar daerah pabean tanpa dokumen.

Sepanjang 20 September hingga 25 September Puskodal Bea Cukai Batam dan Satgas Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 7005 melakukan pemantauan. Dari pemantauan radar, kapal MT. Zakira berada di posisi sebelah timur Teluk Penawar perairan Malaysia dan tengah terpantau banyak kapal mendekat ke kapal MT. Zakira. Diduga MT. Zakira melakukan

STS minyak solar HSD secara ilegal.

Pada 25 September 2022, kapal MT. Zakira telah bergerak dan aktif mengarah Haluan ke barat dari Pengerang dan masuk jalur perairan Malaysia dan Singapura. “Setelah memasuki perairan Indonesia, kapal tersebut diperiksa oleh Satgas Patroli Laut Jaring Sriwijaya di perairan Pulau Karimun Besar. Dari pemeriksaan tersebut kapal MT. Zakira kedapatan mengangkut 629,3 KL HSD dan tidak dilengkapi dokumen kepabeanan,” ujar Askolani. Nilai keseluruhan solar tersebut ditaksir mencapai Rp7.362.810.000,00 dengan kerugian negara mencapai Rp1,362,121,000,00.

Atas penindakan ini, Bea Cukai melakukan pengamanan terhadap tersangka berinisial MI selaku nahkoda kapal dan AZ selaku anak buah kapal. Keduanya telah ditahan dan diperiksa di rumah tahanan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Batam pada 27 September 2022. Selain itu, sembilan orang saksi lainnya juga telah diperiksa. Barang bukti berupa kapal tanker MT Zakira GT 539, 629,3 KL solar 48, dan dokumen-dokumen kapal telah diamankan di dermaga pangkalan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Batam.

Selain penangkapan di atas, sinergi atas pengamanan wilayah perairan laut Indonesia juga dilakukan oleh Bea Cukai Batam bersama Bakamla. Bea Cukai Batam telah menerima penyerahan perkara dari Bakamla atas Kapal Tanker MT. Blue Stars 8 GT 296 berbendera Equatorial Guinea dengan muatan 87,484 KL bahan bakar minyak jenis solar murni (B0). Kapal tersebut ditangkap di Perairan Selat Singapura, Batam, Kepulauan Riau dengan koordinat 01□-14’-30” N - 103□-59’-12” E pada tanggal 26 Agustus 2022 yang diduga mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.

Atas penindakan tersebut, petugas telah mengamankan tersangka berinisial ZA dan AS selaku nahkoda dan bosun kapal MT. Blue Stars 8 GT 296. Barang bukti dan para tersangka telah diamankan oleh Bakamla sejak tanggal 02 September 2022. Estimasi nilai barang dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp1,023,562,800,00 dengan kerugian negara mencapai Rp189,359,118,00.

Sampai dengan bulan Oktober 2022 operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya 2022 telah berhasil menggagalkan penyelundupan dengan total nilai barang Rp244,5 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp242 miliar.

Secara nasional patroli laut Bea Cukai telah menghasilkan 191 penindakan dengan komoditi di antaranya adalah minuman mengandung etil alkohol (MMEA), barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT), barang campuran, narkotika, barang hasil hutan, barang hasil tambang, dan BBM, dengan perkiraan nilai barang Rp685,5 miliar dengan potensi kerugian negara Rp454,3 miliar.

Askolani menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus berupaya melakukan pengamanan wilayah perairan Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut, Bea Cukai akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. “Sinergi mutlak dibutuhkan dalam pengawasan peredaran barang ilegal di Indonesia. Lewat koordinasi dan sinergi yang baik diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan dalam mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya ke wilayah pabean Indonesia,” pungkas Askolani.

Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Kementerian Keuangan pada Kamis, 22 September 2022 menggelar Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Rakernas Akuntansi) Tahun 2022 secara *hybrid* di Ballroom Dhanapala, Kemenkeu. Acara ini dihadiri 82 pimpinan Kementerian/ Lembaga Negara (K/L), dan seluruh kepala daerah atau perwakilan kepala daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik secara luring maupun daring via Zoom dan Youtube Kemenkeu RI. Rakernas Akuntansi Tahun 2022 bertujuan menguatkan komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas para pengelola keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN/ APBD.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan *awareness* atas pentingnya penguatan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada masing-masing

Sesi pembukaan acara oleh Menteri Keuangan didampingi Dirjen Perbendaharaan

entitas pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, menjaga komitmen dan kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, dan memberikan apresiasi atas raihan opini WTP atas laporan keuangan kepada K/L dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dikemas dalam tema "Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat".

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan mengenai adanya tantangan yang berasal dari pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global yang saat ini dihadapi Indonesia. Arah kebijakan fiskal pemerintah diprioritaskan untuk melindungi keselamatan rakyat serta menjaga dan memulihkan perekonomian masyarakat. APBN digunakan sebagai instrumen yang bekerja cukup berat untuk menangani krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. APBN didesain lebih fleksibel dalam merespons tantangan multidimensi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kebijakan *countercyclical* APBN diambil dalam bentuk pelebaran defisit di atas 3 persen dari PDB, sebagai langkah strategis dan efektif untuk melindungi rakyat dan perekonomian nasional.

"Dalam dua tahun terakhir kita menghadapi tantangan Covid-19 yang sangat tidak biasa. Kita tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN

maupun APBD dalam situasi yang sangat *extraordinary* ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dalam memimpin K/L serta daerah dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dan bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan, secara cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel. Ini sebuah kombinasi yang tidak mudah," jelas Menkeu.

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan secara langsung kepada K/L dan Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan (EP) yang telah berhasil meraih opini WTP minimal 15 kali dan 10 kali berturut-turut. 10 EP peraih penghargaan minimal 15 kali WTP berturut-turut adalah Kementerian BUMN, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, PPATK, BPK, Komisi Yudisial, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Adminsitrasi Negara serta Pemkot Tangerang. 85 EP peraih penghargaan minimal 10 kali WTP berturut-turut terdiri dari 23 K/L, 8 Pemprov, 16 Pemkot, dan 38 Pemkab. Menteri Keuanganpun memberikan penghargaan via tayangan video kepada 354 K/L dan Pemerintah Daerah peraih minimal 5 Kali WTP berturut-turut dan kepada 585 K/L dan Pemda peraih WTP atas laporan keuangan Tahun 2021. EP peraih WTP minimal 5 kali berturut-turut termasuk Pemerintah Pusat dan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yang tahun ini meraih WTP ke enam kalinya. Opini WTP atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status WTP dari hasil audit BPK, tetapi yang penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah yang mampu memecahkan berbagai masalah bangsa dan negara Indonesia," tegas Menkeu. Dalam puncak acara Rakernas tahun 2022 tersebut juga diselenggarakan Talkshow yang dimoderatori oleh Kania Sutisnawinata (Wakil Pemimpin Redaktur Metro TV) dengan 4 narasumber yaitu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Wakil Gubernur Jawa Timur, Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas

Sesi Foto Bersama Menteri Keuangan dengan Penerima Penghargaan WTP minimal 10 kali berturut – turut, yang terdiri dari 23 K/L dan 8 Pemprov

Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-R.

Rakernas Akuntansi Tahun 2022 juga dilengkapi dengan serangkaian kegiatan online yang meliputi:

1. 5 jenis lomba: Cerdas Cermat, Menulis Artikel, *Storytelling*, Infografis, dan Komik Digital.

2. Webinar Generasi Keren Peduli APBN dengan tajuk "Generasi Juara Peduli Akuntabilitas Keuangan Negara".

3. *Coaching Clinic* secara *online* dilaksanakan yang terbagi dalam 4 sesi yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Barang Milik Negara, Aplikasi Sakti/Monsakti, dan Perimbangan Keuangan.

Dengan pelaksanaan Rakernas Akuntansi Tahun 2022 ini, diharapkan tercipta komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang semakin sehat, berkinerja baik, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.***

Mengenal Restrukturisasi Utang Melalui Skema *Debt Swap*, Suatu Inisiatif Konversi Utang agar Menjadi Investasi Kegiatan

Salah satu risiko global yang perlu diwaspadai saat ini adalah adanya potensi krisis utang global. Di mana saat ini banyak negara yang memiliki rasio utang sangat tinggi, bahkan di atas 60-100 persen terhadap PDB. Kejadian luar biasa ini timbul akibat pandemi sehingga menuntut pemerintahan seluruh dunia untuk mengatur strategi menjaga ekonomi mereka melalui stimulus fiskal yang amat besar. Kemudian ekonomi dunia yang dipenuhi ketidakpastian seperti saat ini membuat biaya utang dan *revolving risks* naik tajam, bahkan IMF memprediksi bahwa potensi default akibat kenaikan biaya utang dan risiko melonjak pada lebih dari 60 negara.

Indonesia tidak terkecuali juga merupakan negara yang terdampak pandemi dan memberi konsekuensi pelonggaran batas maksimal defisit fiskal. Namun meski demikian, pemerintah tetap

memastikan bahwa komposisi utang dijaga dalam batas aman dan wajar, serta optimal. Selama ini yang telah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga rasio utang pemerintah sehingga tidak menyentuh ambang batas yang telah ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yaitu 60 persen terhadap PDB. Ada beberapa cara menjaga rasio utang yang dilakukan Pemerintah agar rasio utang tidak menyentuh rasio yang telah ditentukan oleh Undang-undang salah satunya melalui konversi pinjaman menjadi investasi kegiatan atau *Debt Swap*.

Debt Swap merupakan mekanisme konversi utang menjadi program atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah guna menangani beberapa permasalahan yang ada di Indonesia, serta disesuaikan dengan *concern* dan prioritas negara peminjam. *Debt Swap* pada praktiknya berlaku untuk utang-utang lama, serta diberikan oleh negara-negara maju dan memiliki hubungan bilateral yang relatif kuat dengan Indonesia. Dengan kata lain, utang yang menjadi obyek *Debt Swap* tersebut dihapuskan atau pemerintah sudah lepas dari kewajiban pembayarannya.

Skema *Debt Swap* mulai ada sejak dicanangkannya perjanjian *Paris Club 2* pada tahun 2000. Belajar dari *Paris Club* dan pengelolaan utang yang hati-hati di masa lalu serta komitmen pemerintah dalam membayar kembali utangnya, Pemerintah Republik Indonesia tetap dipandang positif dan dipercaya oleh para pemberi pinjaman. Hal tersebut juga berhasil memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan keempat negara maju yang telah beberapa kali menawarkan skema *Debt Swap*, antara lain Jerman, Italia, Amerika Serikat dan Australia.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk terus mengedepankan prinsip *prudent*, fleksibel, dan oportunistik, Indonesia masih dianggap positif serta hingga kini negara peminjam masih bersedia menawarkan pengalihan utang menjadi investasi kegiatan berkelanjutan melalui *Debt Swap*. Hingga kini, total nilai nominal pinjaman Indonesia yang telah dikonversi menjadi investasi kegiatan adalah sebesar USD334,94 juta atau setara Rp5,1 triliun, di mana per 30 September 2022 telah terealisasi sebesar USD290,51 juta atau equivalen Rp4,4 triliun. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati, pemerintah juga berkomitmen untuk

turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan total nilai sebesar USD215,35 juta.

Implementasi *Debt Swap* di Indonesia dapat kita lihat dari konversi utang yang diberikan oleh Jerman dan Australia yang peduli terhadap kesehatan, yang antara lain digunakan untuk pemberantasan AIDS, tubercolosis, dan malaria di Indonesia. Sejalan dengan fokus Jerman terhadap pendidikan, sebagian *Debt Swap* dengan Jerman juga digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan seperti program beasiswa, pelatihan guru, serta rekonstruksi dan rehabilitasi gedung sekolah. Selain itu, Amerika Serikat juga bersedia menukar pinjaman Indonesia dengan pembiayaan untuk proyek konservasi hutan tropis sesuai dengan undang-undang konservasi hutan tropis/ *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA). Terakhir, program *Debt Swap* dengan Italia guna merekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana alam.

Debt Swap bagi Indonesia menjadi satu program yang memberikan dampak yang cukup signifikan baik untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia serta menjadi kontributor kontribusi positif bagi upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Ke depannya, opsi *Debt Swap* ini masih terbuka untuk dilaksanakan, bahkan dimungkinkan untuk memperluas penjajakan ke negara peminjam lain. Dengan demikian, diharapkan nominalnya akan semakin meningkat serta memberikan kontribusi yang lebih banyak bagi investasi kegiatan berkelanjutan di Indonesia.

Debt Swap menjadi alternatif yang *win-win solution* bagi Indonesia dan pemberi pinjaman, khususnya dalam mendukung sektor yang disepakati. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara yang cukup penting dalam menyukseskan *Sustainable Development Goals* dan *Green Program* dunia. Namun demikian, terdapat pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti diperlukan waktu proses yang panjang dalam mencapai kesepakatan terkait program yang dibidik dan kondisi tekanan global yang terdampak juga kepada kondisi keuangan negara-negara kreditur.

Akhir Tahun Masih Tiga Bulan Lagi, Penerimaan Pajak Telah Tercapai 90 Persen

Penerimaan Pajak

Pada akhir kuartal ketiga tahun 2022, penerimaan pajak mencatatkan capaian yang menggembirakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp1.310,50 triliun. Capaian tersebut setara dengan 88,25 persen dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Faktor utama penentu penerimaan pajak pada kuartal ketiga tahun 2022 meliputi masih tingginya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif yang ditandai dengan membaiknya tingkat permintaan baik domestik maupun luar negeri, dan implementasi kebijakan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Faktor-faktor utama penentu penerimaan tersebut ditambah dengan basis pertumbuhan yang rendah pada tahun 2021 mendorong pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini sehingga mencapai 54,17 persen (*yoy*).

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target Perpres 98 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 30 September 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	813,68	785,66	64,33	96,56
- Non Migas	749,02	723,31	63,06	96,57
- Migas	64,66	62,35	80,53	96,43
PPN & PPnBM	638,99	504,45	44,78	78,94
PBB	20,90	14,77	0,64	70,67
Pajak Lainnya	11,38	5,62	-36,50	49,39
Jumlah	**1.484,96**	**1.310,50**	**54,17**	**88,25**

Jika dicermati dari bulan ke bulan, kinerja penerimaan pajak kumulatif sampai dengan bulan September 2022 secara umum masih kuat. Meskipun demikian, laju pertumbuhannya terlihat mengalami perlambatan dibandingkan bulan Agustus 2022. Pertumbuhan penerimaan pajak kumulatif sampai dengan bulan September 2022 masih ditopang oleh baiknya kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Badan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai efek penyesuaian tarif, dan harga komoditas yang masih tinggi. Di sisi lain, sedikit menurunnya laju pertumbuhan pada periode ini utamanya disebabkan oleh adanya pergeseran pola transaksi penerimaan pajak dan adanya penerbitan ketetapan pajak yang tidak berulang. Meskipun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini masih mencapai *double digits* dan berada di atas 50 persen (*yoy*).

Pertumbuhan penerimaan kumulatif yang mencapai lebih dari 50 persen (*yoy*) tersebut tercermin pula pada kinerja yang tetap terjaga pada masing-masing kelompok pajak utamanya. Capaian realisasi penerimaan kelompok PPh yang terdiri dari PPh Non Migas dan PPh Migas terdokumentasi berada di atas 90 persen dari target penerimaannya. Dengan lebih presisi, capaian penerimaan kelompok PPh Migas mencapai 96,43 persen dari targetnya dan mengalami pertumbuhan sebesar 80,53 persen (*yoy*) pada periode sampai dengan September 2022. Senada dengan PPh Migas, PPh Non Migas juga menjadi kelompok pajak yang membukukan realisasi penerimaan pajak lebih dari 90 persen dari targetnya dengan tingkat pertumbuhan mencapai 63,06 persen (*yoy*). Hal serupa tampaknya juga dialami oleh kelompok PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua kelompok pajak tersebut secara bersama-sama berhasil menyumbang Rp504,45 triliun. Realisasi tersebut mencapai 78,94 persen dari target penerimaan PPN dan PPnBM serta tumbuh apik sebesar 44,78 persen (*yoy*) dari realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Mengikuti kelompok pajak yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode ini mulai masuk ke zona hijau setelah mengalami tekanan

pada periode sebelumnya. Berbeda dengan kinerja kelompok-kelompok pajak utama, kelompok Pajak Lainnya masih konsisten mengalami perlambatan realisasi pada periode ini.

Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak

Secara umum, kinerja penerimaan per jenis pajak sampai dengan September 2022 ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta dampak dari berbagai bauran kebijakan di bidang perpajakan. Faktor-faktor tersebut membuahkan kinerja pertumbuhan kumulatif yang memuaskan pada seluruh jenis pajak pada triwulan ketiga 2022. Pertumbuhan kumulatif tertinggi dialami oleh jenis pajak PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 Impor mengalami pertumbuhan mencapai 123,52 persen (*yoy*) secara kumulatif. Namun demikian, penerimaan bulanan pada jenis pajak ini mengalami perlambatan seiring dengan moderasi aktivitas impor di Indonesia. Senada dengan PPh Pasal 22 Impor, pajak terkait impor lainnya juga menyiratkan kinerja laju pertumbuhan yang sedikit melambat. PPN Impor dan PPnBM Impor masing-masing tumbuh 48,18 persen (*yoy*) dan 36,44 persen (*yoy*) secara kumulatif dan tumbuh 42,83 persen (*yoy*) dan 26,25 persen (*yoy*) secara bulanan.

Selanjutnya, jenis pajak dengan kontribusi terbesar yaitu PPh Badan tumbuh di atas seratus persen baik secara kumulatif maupun bulanan. Secara lebih tepat, pertumbuhan kumulatif PPh Badan mencapai 115,69 persen (*yoy*) sedangkan pertumbuhan penerimaan bulanannya mencapai 121,79 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan PPh Badan mulai mengalami normalisasi seiring dengan membaiknya *baseline* penerimaan pada bulan September 2021. Membaiknya *baseline* tersebut merupakan dampak dari adanya penyesuaian angsuran PPh Badan menjelang akhir tahun dan pembayaran atas

ketetapan pajak. Berbeda dengan PPh Badan yang mulai mengalami normalisasi, PPN Dalam Negeri (DN) sebagai pajak atas konsumsi masih bertahan dengan pertumbuhan yang tinggi, baik secara kumulatif maupun bulanan. Penerimaan PPN DN tumbuh 39,78 persen (*yoy*) secara kumulatif dan tumbuh 30,89 persen (*yoy*) secara bulanan. Capaian dari penerimaan PPN DN tersebut mengkonfirmasi Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2022 yang mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Indikasi tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 sebesar 117,2, atau tetap berada pada level optimis (indeks >100), meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 124,7.

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama

Jenis Pajak	*Realisasi s.d.* 30 Sept. 2022 *(Rp Triliun)*
PPh Pasal 21	132,19
PPh Pasal 25/29	287,18
- Orang Pribadi	10,34
- Badan	276,84
PPh Pasal 26	52,66
PPh Final	135,85
PPN Dalam Negeri	287,85
Pajak atas Impor	257,66
- PPh 22 Impor	56,52
- PPN Impor	197,65
- PPnBM Impor	3,49

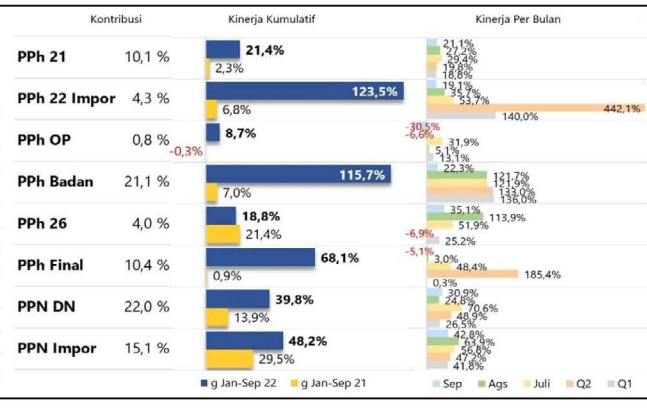

Selain jenis pajak yang telah disebutkan sebelumnya, penerimaan jenis pajak PPh Pasal 21 juga mengalami pertumbuhan kumulatif yang baik. Pertumbuhan kumulatif penerimaan PPh Pasal 21 mencapai 21,36 persen (*yoy*) sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan bulanannya yang mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan 21,06 persen (*yoy*). Laju pertumbuhan penerimaan bulanan yang lebih rendah juga terlihat dialami oleh jenis pajak lainnya seperti PPh Final. Pertumbuhan penerimaan bulanan jenis pajak tersebut terlihat mengalami perlambatan yang disebabkan oleh adanya pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak berulang pada periode ini. Namun demikian, penerimaan kumulatif sampai dengan September 2022 pada jenis pajak PPh Final masih tumbuh tinggi mencapai 68,09 persen (*yoy*). Senada dengan PPh Final, PPh Orang Pribadi (OP) mengalami pertumbuhan kumulatif positif sebesar 8,65 persen (*yoy*) tetapi mengalami kontraksi pada penerimaan bulanannya disebabkan oleh adanya pergeseran pembayaran atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan OP. Terakhir, penerimaan PPh Pasal 26 mengalami perlambatan secara kumulatif dan bulanan karena adanya perbedaan periode pencairan belanja PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Surat Berharga Negara (SBN) Valas antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Fasilitas perpajakan PPh DTP SBN Valas tersebut merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan meningkatkan daya saing instrumen utang negara di pasar internasional.

Kinerja Penerimaan Sektoral

Secara umum, kinerja penerimaan kumulatif sektoral masih tumbuh positif. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan bulanan pada mayoritas sektor sudah mengalami moderasi. Pertumbuhan penerimaan bulanan beberapa sektor terlihat tidak sebaik pertumbuhan kumulatifnya pada periode September 2022. Sebagai contoh, laju pertumbuhan kumulatif pada Sektor Pertambangan masih memuncaki angka laju pertumbuhan dari keseluruhan sektor tetapi pertumbuhannya

tidak sekuat periode sebelumnya. Sampai dengan September 2022, pertumbuhan penerimaan kumulatif pada Sektor Pertambangan mencapai 199,82 persen (*yoy*) lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan bulanan pada sektor tersebut yang mencapai 52,01 persen (*yoy*), mengalami perlambatan daripada periode sebelumnya. Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh mulai membaiknya *baseline* penerimaan pajak Sektor Pertambangan pada September 2021 sebagai akibat dari penyesuaian setoran PPh Badan.

Selanjutnya, Sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi besar dengan besaran hampir mencapai 30 persen terhadap penerimaan nasional mengalami perbaikan pada kinerja penerimaannya. Penerimaan kumulatif pada

Penerimaan Pajak Sektoral

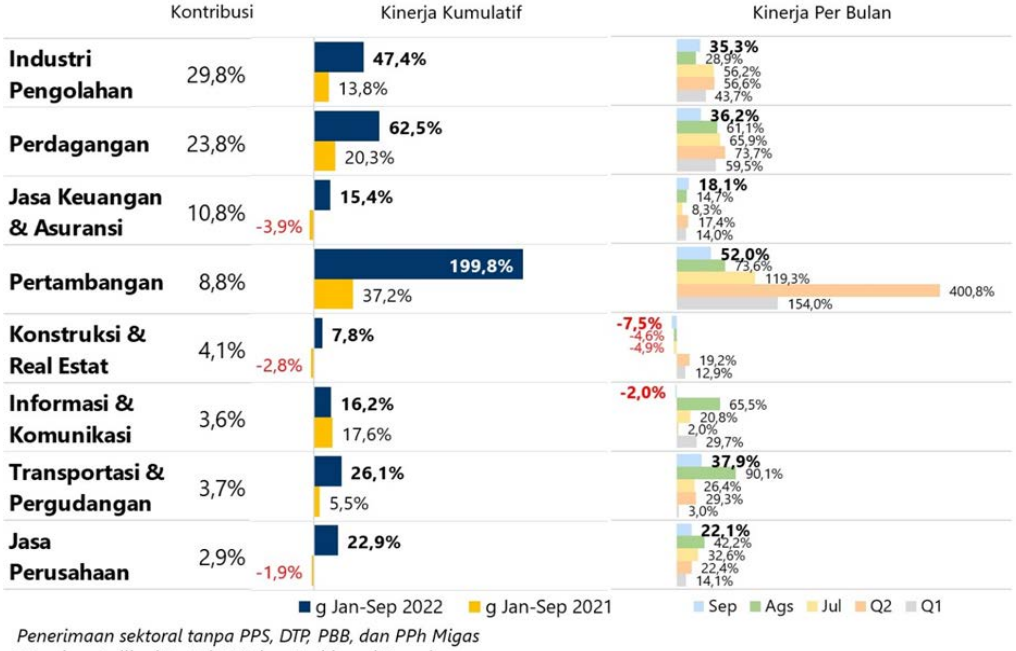

Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas
**Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan*

sektor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 47,36 persen (*yoy*) sedangkan penerimaan bulanannya mengalami pertumbuhan sebesar 35,27 persen (*yoy*). Baiknya kinerja penerimaan pada Sektor Industri Pengolahan utamanya ditopang oleh baiknya kinerja penerimaan pada Sub Sektor Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi dan Industri Kendaraan Bermotor. Penerimaan Sektor Industri Pengolahan yang masih ekspansif tersebut mengkonfirmasi perkembangan *Purchasing Manager's Index* (PMI) beberapa bulan terakhir yang mengindikasikan bahwa Sektor Industri Pengolahan tetap mengalami ekspansi. Dalam dua bulan terakhir PMI tercatat berada pada zona ekspansi (lebih besar dari 50) dengan berada pada level 51,7 dan 53,7 secara berturut-turut pada bulan Agustus 2022 dan September 2022.

Penerimaan kumulatif pada sektor-sektor lainnya tumbuh positif. Namun demikian, pertumbuhannya mengalami moderasi dan terlihat dari laju pertumbuhannya yang tidak sekuat periode sebelumnya. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi sektor dengan pertumbuhan yang masih solid dengan laju pertumbuhan penerimaan kumulatif mencapai 15,40 persen (*yoy*) dan penerimaan bulanan mencapai 18,11 persen (*yoy*). Selanjutnya, pertumbuhan penerimaan kumulatif pada Sektor Konstruksi dan Real Estate pada zona hijau dengan laju pertumbuhan mencapai 7,82 persen (*yoy*). Namun demikian, kinerja penerimaan bulanan pada sektor tersebut mengalami tekanan dampak dari perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah. Pada regulasi sebelumnya, PPN yang dipungut oleh Instansi Pemerintah disetor atas nama Wajib Pajak

Sektor Konstruksi dan Real Estat sebagai rekanan. Mekanisme pemungutan pajak tersebut menyebabkan penerimaan atas transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai penerimaan Sektor Konstruksi dan Real Estat. Dengan diterapkannya PMK-58 dan PMK-59 tahun 2022, pembayaran atas transaksi yang sama disetorkan atas nama Instansi Pemerintah sehingga penerimaan tersebut akan dikategorikan sebagai penerimaan sektor lainnya.

Lebih lanjut, penerimaan kumulatif pada Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan kumulatif yang baik mencapai 16,18 persen (*yoy*) meskipun secara bulanan penerimaan pada sektor tersebut mengalami kontraksi. Kontraksi penerimaan bulanan pada Sektor Informasi dan Komunikasi utamanya disebabkan oleh adanya pembayaran PPN atas penjualan aset pada bulan September 2021 yang tidak terulang kembali. Terakhir, Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Sektor Jasa Perusahaan masih tumbuh baik secara kumulatif dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 26,05 persen (*yoy*) dan 22,86 persen (*yoy*). Namun demikian, pertumbuhan bulanan dari kedua sektor tersebut mengalami perlambatan pada periode ini.

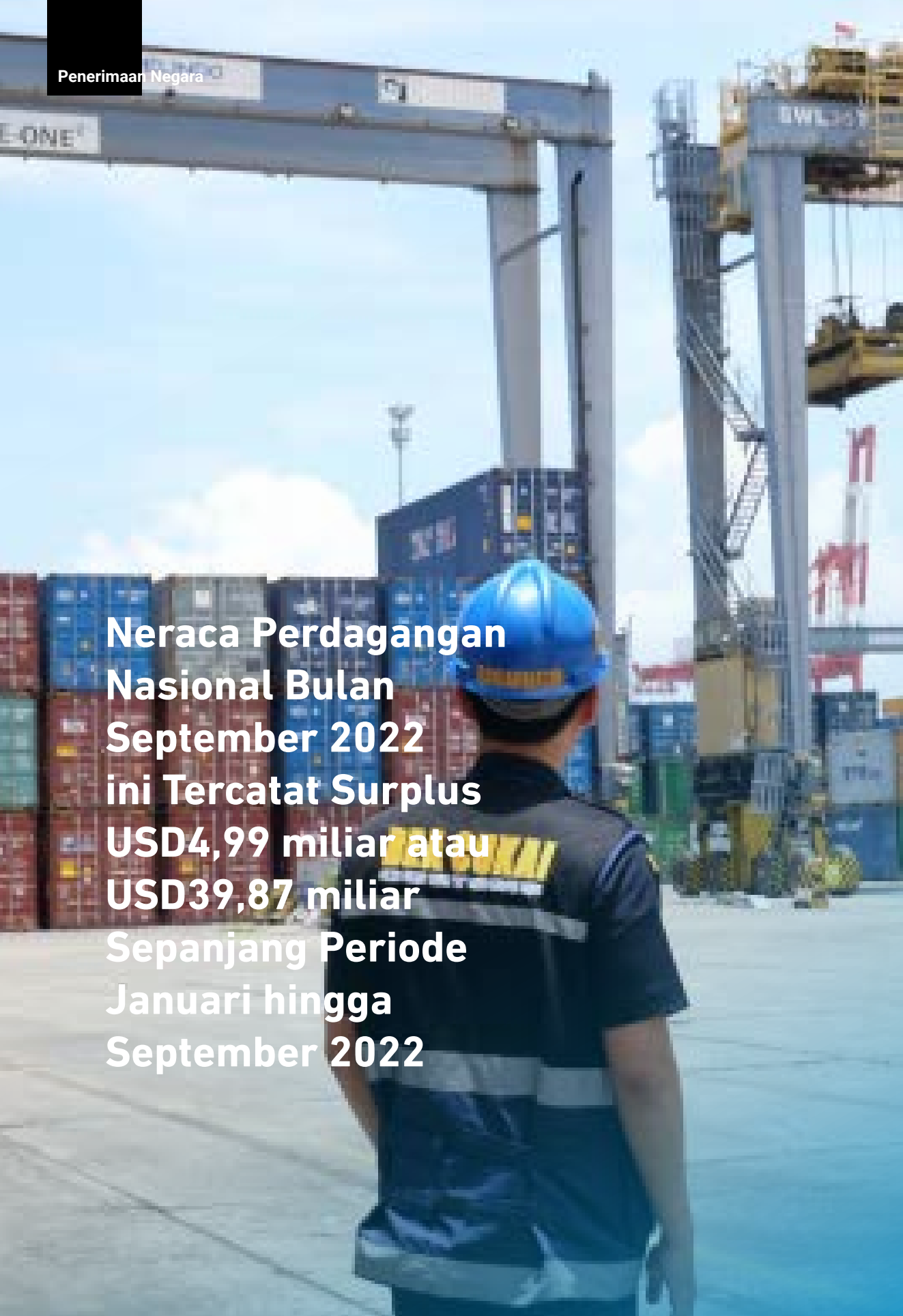

Neraca Perdagangan Nasional Bulan September 2022 ini Tercatat Surplus USD4,99 miliar atau USD39,87 miliar Sepanjang Periode Januari hingga September 2022

Kepabeanan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan September 2022 mencapai USD4.99 miliar turun USD 0.7 miliar atau 12,6 persen dibanding bulan sebelumnya meskipun tercatat surplus. Surplus NP ini masih melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu pada bulan Juni 2020. Nilai surplus NP menurun dibandingkan bulan lalu disebabkan perlambatan kinerja ekspor. Namun demikian surplus ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, terutama dari neraca nonmigas. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit masih meningkat akibat tingginya harga.

Surplus NP dari sisi nonmigas, didorong harga komoditas yang masih tinggi. Kinerja neraca nonmigas didorong oleh ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, bijih tembaga, dan produk sawit. Sedangkan dari sektor manufaktur berupa olahan logam dan kendaraan.

Kinerja ekspor bulan September 2022 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan September 2021, masih mengalami peningkatan sebesar 20,28 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini terjadi terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor khususnya komoditas batubara jenis Lignit. Tren pertumbuhan ekspor yang masih positif, terutama berasal dari sektor pengolahan dan pertambangan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2022, ekspor turun negatif 11,13 persen

Tabel 1: Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres 98	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth (y-o-y, %) 2021	Growth (y-o-y, %) 2022	% Capaian
1	BEA MASUK	42.34	27.59	36.29	13.68%	31.56%	85.72%
2	CUKAI	220.00	132.77	158.80	15.13%	19.61%	72.18%
	Hasil Tembakau	209.91	128.33	153.05	15.14%	19.27%	72.91%
	Ethil Alkohol	0.13	0.08	0.10	-61.13%	18.02%	73.26%
	MMEA	6.86	4.28	5.60	18.70%	30.89%	81.64%
	Denda Adm. Cukai	-	0.06	0.03	64.54%	-46.20%	-
	Cukai Lainnya	-	0.02	0.02	112.19%	-1.11%	-
	Plastik & MBDK	3.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	BEA KELUAR	36.69	22.56	37.04	910.58%	64.17%	100.96%
	TOTAL	299.03	182.92	232.14	28.98%	26.91%	77.63%
	PPN Impor		133.39	197.65	29.47%	48.18%	
	PPn BM Impor		2.56	3.49	10.76%	36.44%	
	PPh Pasal 22 Impor		25.29	56.52	6.81%	123.52%	
	Total PDRI lainnya		161.23	257.66	24.97%	59.81%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		344.15	489.80	27.07%	42.32%	

(dalam Triliun Rupiah). Sumber: DJPB 5 Oktober 2022

(*mtm*), sebagai dampak moderasi harga komoditas.

Dari sisi ekspor nonmigas, bulan September 2022 tumbuh 19,26 persen (*yoy*). Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan lignit, yang masing-masing tumbuh 56,88 persen (*yoy*) dan 115,23 persen (*yoy*). Begitu juga dengan ekspor sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 41,80 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusi oleh peningkatan ekspor gas alam & buatan ke Korea Selatan dan minyak bumi ke Thailand.

Pada bulan September kinerja positif juga terjadi pada impor, yang tercatat tumbuh sebesar 22,02 persen (*yoy*), sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan lalu, impor turun negatif 10.57 persen (*mtm*). Dari sektor migas, impor tumbuh 83,53 persen (*yoy*) terutama dari impor BBM dan gas alam maupun buatan. Harga minyak dunia per September 2022 menguat dibandingkan tahun sebelumnya, namun dibandingkan bulan sebelumnya harga minyak turun akibat kekhawatiran perlambatan ekonomi. Selain itu, permintaan bahan bakar dalam negeri, masih meningkat sejalan dengan kembalinya kegiatan ekonomi dan mobilitas.

Dari sisi nonmigas, impor tumbuh 14,02 persen (*yoy*) terutama impor kebutuhan industri seperti Logam, mesin penambangan atau konstruksi dan komponen elektronik, sebagai dampak pemulihan kegiatan ekonomi.

REALISASI PENERIMAA KEPABEANAN DAN CUKAI

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 30 September 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp232,14 triliun atau 77,63 persen dari target Perpres 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan naik 26,91 persen (*yoy*). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, terutama penerimaan Cukai, kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 30 September 2022 mencapai Rp257,66 triliun atau tumbuh 59,81 persen (*yoy*). Alhasil, total penerimaan negara

yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp489,80 triliun atau tumbuh sebesar 42,32 persen (*yoy*).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan September 2022 sebesar Rp36,29 triliun atau 85,72 persen dari target Perpres 98/2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 31,56 persen (*yoy*) bila dibandingkan tahun lalu, didorong kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 30 September 2022 mencapai Rp158,80 triliun atau 72,18 persen dari target Perpres 98/2022, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 19,61 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai dikontribusi oleh Hasil Tembakau (HT), diikuti Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA).

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir Agustus 2022 tumbuh 19,27 persen (*yoy*), mencapai Rp153,05 triliun atau 72,91 persen dari targetnya. Kinerja ini didukung oleh efektivitas kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, namun produksi batang rokok mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen. Berdasarkan data pemesanan pita cukai, per bulan September 2022, pertumbuhan produksi sigaret turun sebesar negatif 2,6 persen (*yoy*), dengan demikian kondisi ini masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 30 September 2022 masih tumbuh double digits, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 30,89 persen (*yoy*) atau mencapai Rp5,60 triliun. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi MMEA, terutama produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 98,2 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir September 2022 masih mengalami pertumbuhan 18,02 persen (*yoy*), atau sebesar Rp95,24 miliar. Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 30 September 2022 tumbuh signifikan 64,17 persen (*yoy*). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO dan Turunannya. Penerimaan BK mencapai Rp36,29 triliun atau 100,96 persen dari target Perpres 98 Tahun 2022. Penerimaan BK tembaga tumbuh 79,47 persen (*yoy*) didukung peningkatan volume ekspor dan tingginya harga tembaga. Penerimaan BK komoditas CPO dan turunannya tumbuh 62,48 persen (*yoy*). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa harga referensi CPO sudah mengalami penurunan menjadi sebesar USD 846/MT di bulan September 2022.

Hingga September 2022, DJBC telah memberikan fasilitas Kepabeanan untuk Alkes senilai Rp1,06 Triliun. Fasilitas yang diberikan terus menurun seiring dengan pandemi yang semakin terkendali. Pemerintah terus melakukan evaluasi atas insentif yang diberikan serta kemungkinan perpanjangan pemberian insentif pada tahun 2023. Meskipun diperkirakan tidak akan ada pemberian insentif kembali, namun pemberian Insentif sektor Kesehatan pada tahun 2023 masih dapat menggunakan skema fasilitas lain seperti : Fasilitas bagi Pemerintah untuk Kepentingan Umum, Fasilitas Hibah/Amal Sosial, Fasilitas bagi Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Penanaman Modal, dan lain-lain.

Masa Keemasan Batubara Masih Berlanjut

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perang Rusia-Ukrania mendorong tingginya permintaan global atas batu bara. Suplai bahan baku energi yang terbatas dan mulai menggeliatnya perekonomian pasca Covid-19 turut mendongkrak permintaan emas hitam ini. Kondisi inilah yang membuat harga batu bara tetap bertahan di level tertinggi. Dampaknya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba hingga 30 September 2022 pun terdongkrak dan tumbuh 115,93 persen (*yoy*).

Realisasi PNBP sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp431,50 triliun atau mencapai 89,59 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 34,43 persen (*yoy*) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 22,59 persen. Namun demikian, kinerja PNBP ini lebih lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2022 yang tumbuh 38,90 persen (*yoy*). Pendapatan SDA (baik SDA Migas maupun SDA Nonmigas) masih memberikan kontribusi signifikan mendorong pertumbuhan PNBP.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN Perpres 98/22	Realisasi s.d. 30 Sep 2022	% APBN	% Growth (yoy)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**481.631,10**	**431.504,81**	**89,59**	**34,43**
A Pendapatan SDA	**226.518,50**	**179.631,07**	**79,30**	**85,39**
1 Migas	**139.098,41**	**109.654,14**	**78,83**	**76,77**
a Minyak Bumi	106.487,89	89.965,34	84,48	62,22
b Gas Bumi	32.610,52	19.688,80	60,38	199,52
2 Nonmigas	**87.420,09**	**69.976,93**	**80,05**	**100,73**
a Pendapatan Pertambangan Minerba	78.871,29	63.689,93	80,75	115,93
b Pendapatan Kehutanan	5.241,15	3.829,26	73,06	7,25
c Pendapatan Perikanan	1.686,56	870,04	51,59	112,97
d Pendapatan Panas Bumi	1.621,09	1.587,71	97,94	14,51
B Pendapatan KND	**37.089,85**	**40.595,60**	**109,45**	**37,63**
C Pendapatan PNBP Lainnya	**112.221,73**	**143.769,54**	**128,11**	**41,14**
D Pendapatan BLU	**105.801,01**	**67.508,59**	**63,81**	**(27,20)**

Perkembangan HBA Tahun 2021-2022

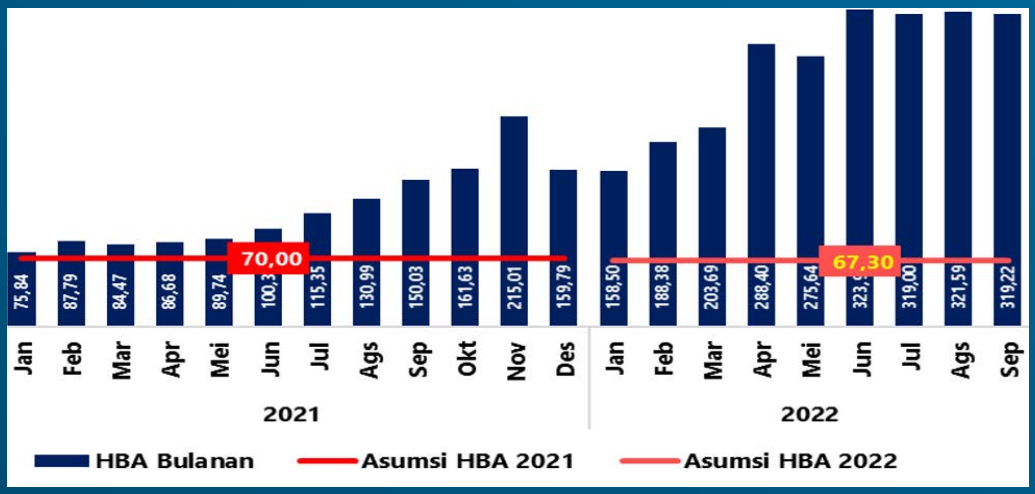

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp179,63 triliun atau 79,30 persen dari target dalam APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp109,65 triliun, serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp69,98 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 September 2022 tumbuh 85,39 persen (*yoy*) ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh 32,98 persen. Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batu bara.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 30 September 2022 sebesar Rp109,65 triliun atau mencapai 78,83 persen dari target dalam APBN Perpres 98/2022. Realisasi ini tumbuh 76,77 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 16,38 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan September 2022 dipengaruhi oleh realisasi ICP bulan Agustus 2022 sebesar USD94,17 yang penerimaannya diterima pada bulan September 2022. Rata-rata ICP bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar USD103,21 per barel atau naik 56,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rata-rata lifting minyak bumi bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar 606,44 ribu barel per hari atau turun 8,81 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula, rata-rata lifting gas bumi bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar 955,81 ribu barel setara minyak per hari atau turun 5,62 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, rata-rata ICP periode bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar USD103,21 per barel, sedangkan asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar USD63,0 per barel. Dengan demikian, kenaikan ICP tersebut mampu mengkompensasi penurunan lifting minyak bumi dan gas bumi sehingga penerimaan Pendapatan SDA Migas tetap tumbuh positif.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 30 September 2022 mencapai Rp69,98 triliun atau 80,05 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 100,73 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 78,22 persen.

Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh 115,93 persen (*yoy*) dengan realisasi produksi batu bara sampai dengan 30 September 2022 sebesar 517,42 juta ton. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode hingga 31 Agustus 2022 yang tumbuh 114,20 persen (*yoy*). Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batu bara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022 sebesar USD266,5 per ton. Realisasi HBA ini mengalami kenaikan 160,3 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD102,4 per ton). Di samping itu, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba pada bulan September 2022 yang mencapai Rp12,71 triliun ini lebih tinggi dari pada rata-rata realisasi bulan Januari s.d. Agustus 2022 sebesar Rp7,16 T. Dengan demikian, pada bulan September 2022 terjadi lonjakan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba. Hal ini disebabkan selain masih tingginya harga batu bara, juga didorong dari terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM (berlaku efektif per tanggal 14 September 2022).

Selanjutnya, Iuran Produksi/ Royalti dari sektor Pertambangan Minerba juga turut menyumbang PNBP mencapai Rp61,34 triliun atau tumbuh 114,70 persen (*yoy*). Batu bara dan Nikel menjadi kontributor terbesar PNBP dari Iuran Produksi/Royalti Minerba. Royalti batu bara menghasilkan PNBP sebesar Rp44,71 triliun dan royalti nikel menyumbang Rp7,88 triliun. Adapun Iuran Tetap dari sektor Pertambangan Minerba hingga 30 September 2022 menghasilkan Rp749,08 miliar atau tumbuh 73,29 persen (yoy). Sedangkan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 30 September 2022 mencapai Rp1,60 triliun atau tumbuh 223,45 persen (*yoy*).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 30 September 2022 mencapai Rp3,83 triliun atau 73,06 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,25 persen (*yoy*). Kenaikan ini didorong oleh produksi kayu yang mengalami peningkatan dari sebesar 40.910.712 m3 per 30 September 2021 menjadi sebesar 41.366.606 m3 per 30 September 2022. Di samping itu, kenaikan ini juga disumbang dari pembayaran piutang PNBP Penggunaan

Kawasan Hutan (PKH) yang hingga 30 September 2022 terealisasi sebesar Rp639,48 miliar. *Automatic Blocking System* (ABS) terhadap 20 Wajib Bayar hingga 30 September 2022 menyumbang penerimaan sebesar Rp71,74 miliar.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 30 September 2022 mencapai Rp870,04 miliar atau 51,59 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 112,97 persen (*yoy*). Kenaikan pertumbuhan signifikan utamanya disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Dalam keputusan Menteri KKP tersebut diatur perhitungan baru pungutan hasil perikanan yang penetapannya mempertimbangkan jenis ikan, rata-rata mutu ikan hasil tangkapan, rata-rata ukuran ikan, dan rata-rata harga ikan di seluruh lokasi pendapatan ikan. Di samping itu, kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan juga disumbang dari penerbitan perizinan. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIUP/SIKPI) hingga bulan September 2022 meningkat menjadi 1.664 izin (tahun 2021 sebesar 836 izin). Sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga meningkat menjadi 3.709 izin (tahun 2021 sebesar 2.942 izin).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp1,59 triliun atau 97,94 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 14,51 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang COD pada tanggal 26 Desember 2021, dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP. Selanjutnya, peningkatan Setoran Bagian Pemerintah dan penurunan besaran pencadangan saldo reimbursement PPN (sebagai pengurang bagian Pemerintah) turut menyumbang kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp40,60 triliun atau 109,45 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 37,63 persen (*yoy*) bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya kinerja Pendapatan KND hingga bulan September 2022 utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga 30 September 2022 mencapai Rp24,58 triliun atau tumbuh 80,9 persen (*yoy*).

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 30 September 2022 mencapai Rp143,77 triliun atau 128,11 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 41,14 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi PNBP Lainnya disumbang utamanya lain dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp57,24 triliun atau tumbuh 183,70 persen (*yoy*). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya PP No.15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batu bara (berlaku per 18 April 2022), maka para Wajib Bayar melakukan setoran kurang bayar PHT bagi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sejak 1 Januari s.d. 17 April 2022. Di samping itu, kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya juga disumbang dari Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang mencapai Rp4,54 triliun atau tumbuh 188,75 persen (*yoy*). Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga antara lain layanan administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor) sebesar Rp4,28 triliun atau tumbuh 95,25 persen (*yoy*), Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp1,32 triliun atau tumbuh 79,43 persen (*yoy*), dan Pendapatan Layanan Pertanahan Rp1,75 triliun atau tumbuh 19,29 persen (*yoy*).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp67,51 triliun atau 63,81 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Realisasi PNBP BLU mengalami kontraksi sebesar 27,20 persen (*yoy*). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit s.d 30 September 2022 yang terealisasi sebesar Rp30,88 triliun atau turun 46,00 persen dibanding periode yang

sama tahun 2021 (Rp57,14 triliun). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit antara lain dampak kebijakan pelarangan ekspor (yang diberlakukan sejak tanggal 28 April 2022 hingga 22 Mei 2022), adanya pengenaan tarif USD0 (berdasarkan PMK No 115/2022) yang mulai diberlakukan sejak 15 Juli 2022, dan penurunan volume ekspor. Di samping itu, penurunan pendapatan BLU juga diakibatkan adanya penurunan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita.

.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga bulan September tahun 2022 utamanya Dimanfaatkan untuk Berbagai Kewajiban Pemerintah dan Bantuan Pemerintah

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2022 mencapai Rp1.361,19 triliun atau 59,14 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut utamanya untuk pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, pembayaran subsidi dan kompensasi, serta penyaluran bansos.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp674,37 triliun atau 71,31 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan gaji ke-13, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bansos, serta penyaluran berbagai program PEN.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp190,35 triliun atau 71,51 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	Perpres 98/2022	Realisasi s.d September	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	945,75	674,37	71,31	(8,12)
Belanja Pegawai	266,18	190,35	71,51	4,37
Belanja Barang	337,94	261,21	77,29	(17,63)
Belanja Modal	199,20	106,61	53,52	(10,15)
Bantuan Sosial	142,43	116,19	81,58	0,31
Belanja Non-K/L	1.355,89	686,82	50,65	29,24
a.l. Belanja Pegawai	160,34	120,00	74,84	1,92
Subsidi	283,66	167,20	58,94	26,67
Total Belanja Pemerintah Pusat	**2.301,64**	**1.361,19**	**59,14**	**7,57**

(dalam Triliun Rupiah)

Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk Gaji ke-13 dan THR. Realisasi tersebut meningkat sebesar 4,37 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan September tahun 2022 mencapai Rp261,21 triliun atau 77,29 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja barang tersebut mengalami penurunan sebesar 17,63 persen. Penurunan tersebut memberikan indikasi bahwa dampak pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, salah satunya ditunjukkan dengan realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan yang tinggi di tahun 2021 menjadi lebih rendah di tahun 2022. Selain itu, realisasi yang lebih rendah tersebut juga disebabkan oleh realisasi program BPUM tahun 2021 yang cukup besar. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang hingga September tahun 2022 utamanya digunakan untuk berbagai program yang bersifat reguler dan program yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui beberapa K/L seperti Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Operasional Siswa (BOS), bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan, penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, pemberian insentif tenaga kesehatan, penugasan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa LPDP, kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan September 2022 mencapai Rp106,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 30 September 2022

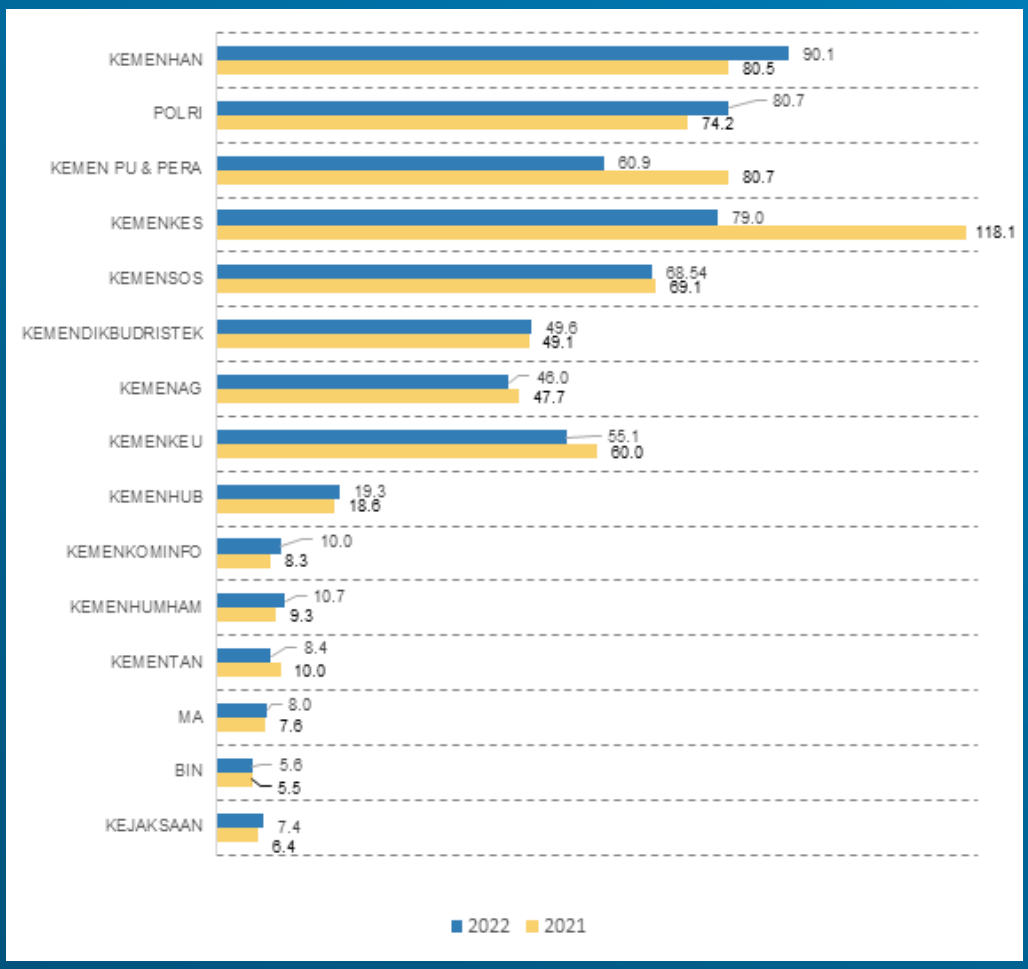

TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)

Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 dan dibayarkan pada awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan September 2022 utamanya masih ditopang dari : (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan, (2) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api dan Bendungan) pada Kementerian PUPR dan Kemenhub, (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan POLRI, bandara pada Kemenhub, rusun dan rusus pada Kementerian PUPR, dan gedung pendidikan tinggi pada Kemenag.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp116,19 triliun atau 81,58 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi Bansos tersebut meningkat 0,31 persen dari periode yang sama pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh penyaluran bantuan BLT BBM. Adapun pemanfaatan bansos sampai dengan bulan September 2022 digunakan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap I, II dan III kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,3 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 20,65 juta KPM; (5) pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN bulan Januari hingga September bagi 95,2 juta jiwa; serta (6) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 14,9 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 638,2 ribu mahasiswa

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 30 September 2022 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 88,88 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan

persenjataan pada Kemenhan dan Polri, penanganan pasien Covid 19 dan program pelaksanaan vaksinasi pada Kemenkes, penyaluran berbagai bantuan sosial pada Kemensos, serta pembayaran selisih harga biodiesel yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BLU BPDPKS. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 30 September 2022 mencapai Rp686,82 triliun atau 50,65 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, tumbuh 29,24 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp120,00 triliun atau 74,84 persen terhadap pagu APBN Perpres 98/2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri (termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13), serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi belanja Subsidi sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp167,20 triliun, sebesar 58,94 persen dari APBN Perpres 98/2022 atau naik sebesar 26,67 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp123,80 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp43,40 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak. Realisasi belanja Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 31 Agustus 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 11,85 juta KL, LPG tabung 3 Kg mencapai 5,13 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,65 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 41,62 TWh. Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan 30 September 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 5,61 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 5,64 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp269,31 triliun, dan

Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 118,37 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp119,04 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp104,78 triliun dalam rangka memastikan ketersediaan energi dalam negeri yang terjangkau masyarakat. Selain itu, realisasi Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk Program Kartu Prakerja mencapai Rp12,40 triliun, meliputi biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi dengan total peserta mencapai 3,5 juta orang.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp552,68 triliun

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp552,68 triliun atau 68,67 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp499,56 triliun atau 67,80 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022 dan Dana Desa Rp53,12 triliun atau 78,12 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,07 persen (*yoy*).

A. DANA PERIMBANGAN

Hingga 30 September 2022, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) telah mencapai Rp63,99 triliun atau 45,57 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Terjadi peningkatan sebesar 6,58 persen (*yoy*) yang dipengaruhi adanya penyaluran Sebagian Kurang Bayar DBH. PMK tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH definitif telah ditetapkan melalui PMK nomor 127/PMK.07/2022 yaitu sebesar Rp41,87 triliun. Kurang Bayar DBH sebesar Rp12,34 triliun telah disalurkan pada bulan ini, dan sisanya direncanakan

akan diselesaikan seluruhnya pada tahun 2022. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp11,08 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp40,58 triliun.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) per akhir September 2022 telah mencapai Rp309,37 triliun atau 81,84 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,01 persen (*yoy*) yang disebabkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 30 September 2022 mencapai Rp25,39 triliun atau 41,71 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 23,60 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan adanya surat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2022 oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang membuat dampak adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, hal lain yang menyebabkan peningkatan penyaluran dibandingkan tahun lalu yaitu adanya perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik, yang seharusnya tanggal 21 Juli 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB sesuai dengan KMK nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB TA 2022. Sementara pada tahun 2021 lalu, perpanjangan waktu penyampaian syarat salur sampai dengan 31 Agustus 2021 untuk seluruh bidang sehingga untuk tahun 2022 penyampaian syarat salur DAK Fisik untuk penyaluran bertahap dan sekaligus lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal lain yang mendukung peningkatan *yoy* penyaluran DAK Fisik yaitu adanya pelaksanaan sosialisasi terkait reviu APIP dalam penyaluran DAK Fisik pada tahun 2021, sehingga APIP lebih memahami tupoksi dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2022.

Sampai dengan 30 September 2022, DAK Nonfisik yang telah disalurkan adalah sebesar Rp84,68 triliun atau 65,79 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,12 persen (*yoy*) yang dikarenakan adanya perhitungan sisa dana BOS 2020 dan 2021 pada penyaluran tahap 2 dan tahap

3 untuk memaksimalkan sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 yang terdapat di rekening sekolah. Selain itu, terdapat Penurunan realisasi TPG dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh lebih sedikitnya laporan pemda yang disampaikan sebagai syarat penyaluran dibandingkan dengan tahun lalu. Rendahnya laporan yang disampaikan tersebut karena daerah sedang melakukan proses pembayaran kepada guru dan proses rekonsiliasi antara BPKAD dan Dinas Pendidikan terkait dengan data guru yang memenuhi syarat untuk dapat dibayarkan TPG nya.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Per akhir September 2022, DID atas kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,00 Triliun telah disalurkan sebanyak Rp2,59 triliun atau 64,91 persen dari pagu DID yang ditetapkan dalam APBN Perpres 98/2022 dan dialokasikan untuk 383 Pemda. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2021 yaitu sebesar 61,30 persen dari pagu alokasi DID yang ditetapkan dalam Perpres No. 113 Tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan Perpres 98/2022, total pagu DID atas kinerja tahun berjalan yaitu sebesar Rp3,00 Triliun dimana sampai dengan akhir September 2022 telah dialokasikan sebesar Rp1,50 triliun untuk 125 pemda penerima melalui penetapan PMK No. 140 Tahun 2022.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Hingga 30 September 2022, Dana Otonomi Khusus yang telah disalurkan adalah sebesar Rp10,96 triliun atau 53,64 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, naik 87,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus melalui PMK nomor 76/PMK.07/2022 dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding sebelumnya serta penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke masing-masing RKUD provinsi, kabupaten dan kota di Wilayah Papua. Sedangkan untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, untuk penyaluran tahap III berdasarkan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir estimasi di triwulan ke-4 TA 2022.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	2021		2022		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48*	541.470,89	804.780,47	552.680,11	68,67
Transfer ke Daerah	723.479,48	491.304,96	736.780,47	499.556,94	67,80
A. Dana Perimbangan	688.676,56	476.128,72	708.024,21	483.442,95	68,28
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	366.333,00	518.430,37	373.372,77	72,02
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	60.047,23	140.430,37	63.998,73	45,57
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	306.285,77	378.000,00	309.374,03	81,84
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	109.795,72	189.593,84	110.070,18	58,06
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	20.541,01	60.874,00	25.387,92	41,71
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	89.254,71	128.719,84	84.682,26	65,79
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	8.275,36	7,000,00	4.096,53	58,52
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	6.900,88	21.756,26	12.017,46	55,24
1. Dana Otsus	19.982,92	5.844,88	20.436,26	10.961,46	53,64
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	2.266,75	8.505,00	4.447,93	52,30
b. Provinsi Aceh	7.805,83	2.266,75	7.560,00	4.606,42	60,93
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	1.311,38	4.371,26	1.907,11	43,63
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	1.056,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	72.000,00	50.165,94	68.000,00	53.123,17	78,12

Tanggal 1 – 30 September 2022 (dalam miliar Rupiah)

B. DANA DESA

Sampai dengan 30 September 2022, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp53,12 triliun atau 78,12 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,89 persen (*yoy*). Hal tersebut disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp19,54 triliun kepada 7,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.933 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp4,68 triliun atau 39,24 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan, Pemerintah memberikan relaksasi terkait kebijakan pemberian BLT Desa melalui PMK Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dimana salah satunya bahwa KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Langkah Antisipatif Menghadapi Ketidakpastian dan Volatilitas Global Melalui Penurunan Realisasi Target Pembiayaan

Pembiayaan Utang

Kinerja APBN hingga akhir September 2022 APBN mengalami surplus sebesar Rp60,86 triliun atau 0,33 persen PDB. Sementara realisasi pembiayaan utang hingga September 2022 mencapai Rp478,90 triliun atau 50,70 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 26,04 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pembiayaan utang tahun sebelumnya yang sebesar Rp647,49 triliun. Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan dari sisi pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp470,87 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp8,02 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3,95 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1,40 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar

Pembiayaan Utang

per 30 September 2022

"Langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian dan volatilitas global melalui penurunan realisasi target pembiayaan

Realisasi
Pembiayaan Utang
*dalam triliun rupiah

Rp **478,90**

Surat Berharga Negara (Neto)	Rp 470,87
Pinjaman (Neto)	Rp 8,02
◆ Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	Rp 2,55
● Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	Rp 3,95
● Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Rp (1,40)
◆ Pinjaman Luar Negeri (Neto)	Rp 5,47
● Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	Rp 62,96
● Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	Rp (57,49)

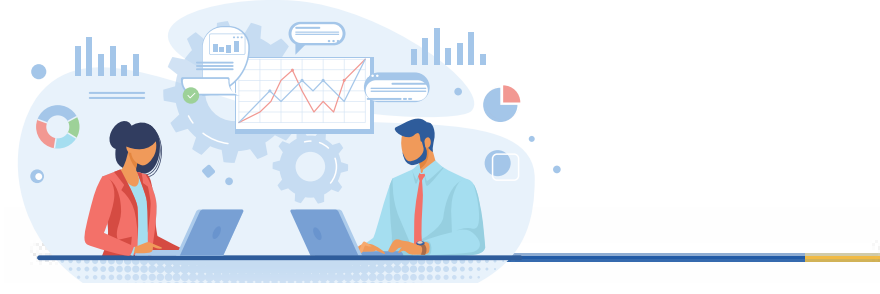

negeri sebesar Rp62,96 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp57,49 triliun.

Selama bulan September, Pemerintah masih melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya yaitu pada tanggal 6, 13, 20, dan 27 September 2022. Lelang regular dilakukan secara bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pada tanggal 2 September 2022, Pemerintah melakukan penerbitan SBSN secara *private placement* dengan nominal sebesar USD150 juta untuk USDPBS-003 dan USD25 juta untuk USDPBS-004. Pemerintah juga telah menerbitkan SBSN dengan cara *Private Placement* dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada bulan September 2022 dengan jumlah sebesar Rp0,4 triliun. Sementara itu, terkait implementasi SKB III, pada bulan September 2022 telah dilakukan penerbitan SBSN yang pertama kali untuk SKB III sebesar Rp16,58 triliun serta penerbitan SUN yang kelima kali untuk SKB III sevesar Rp16,58 triliun.

Selain itu, penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap. Fleksibilitas penerbitan SBN Valas dilakukan dengan mempertimbangkan window yang tepat, bergantung pada kondisi pasar dan kondisi kas.

Pada tahun 2022 pemerintah telah beberapa kali menerbitkan SBN Valas dan selalu mencatatkan *oversubscription*. Yang terbaru pada awal September lalu, Pemerintah berhasil menerbitkan *Global Bond* senilai USD2,65 miliar dan menjadi negara Asia pertama yang menerbitkan obligasi global di Pasar AS dalam empat bulan terakhir. Di tengah gejolak pasar global, transaksi ini telah mencatatkan *orderbook final* sebesar USD12 miliar (atau 4x *oversubscripti*on), dan merupakan *orderbook* terbesar sejak pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi kita masih diminati oleh investor asing. Selain itu, pemerintah juga melakukan transaksi *liability management* sebesar USD0,325 miliar.

Untuk memperkuat basis investor domestik, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan optimalisasi penerbitan SBN Ritel. Terbaru, Pemerintah telah menyelesaikan penerbitan Sukuk Ritel SR017 dengan total order Rp26,97 triliun dari 65.362 investor. Jumlah tersebut setara dengan 80 persen kapasitas Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan menjadikan SR017 menjadi SBN Ritel dengan jumlah investor terbanyak sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel serta menunjukkan bahwa permintaan investor ritel domestik masih tinggi. Sisa penerbitan SBN Ritel selanjutnya adalah Obligasi Negara Ritel ORI 022 yang baru saja ditutup masa penawarannya

Komposisi Utang

per 30 September 2022

Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

Posisi Utang

Per 30 September 2022

Rp **7.420,47**

*dalam triliun rupiah

DEBT **Debt to GDP : 39,30%**

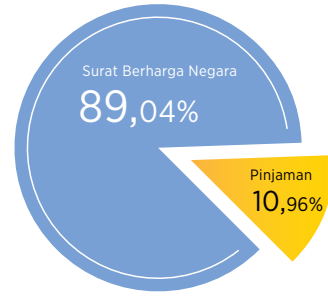

Surat Berharga Negara

Rp **6.607,48**

*dalam triliun rupiah

Domestik	Rp 5.242,33
Surat Utang Negara	Rp 4.254,15
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 988,17
Valas	Rp 1.365,15
Surat Utang Negara	Rp 1.027,39
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 337,77

Pinjaman

Rp **812,99**

*dalam triliun rupiah

Pinjaman DN*	Rp 16,02
Pinjaman LN*	Rp 796,97
Bilateral	Rp 260,05
Multirateral	Rp 492,30
Comercial Banks	Rp 44,63
Suppliers	Rp -

pada 20 Oktober 2022 serta Sukuk Tabungan ST009 yang akan menjadi SBN Ritel terakhir di tahun 2022 dan akan ditawarkan pada Oktober sd November 2022.

Di tahun 2022 ini, Pemerintah melanjutkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan), secara prudent dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Sampai dengan 18 Oktober 2022, realisasi SKB I untuk tahun 2022 telah mencapai Rp41,55 triliun, sedangkan realisasi SKB III untuk tahun 2022 telah mencapai Rp95,42 triliun. Menjadi catatan penting dalam pelaksanaan SKB, bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir proses implementasi sebagaimana tertuang dalam UU 2/2020.

Sampai dengan akhir September 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.420,47 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,30 persen.

Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang pada akhir September 2022 jika dibandingkan dengan bulan lalu. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Alasan rasio utang masih berada pada batas aman karena masih jauh di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam Undang Undang yang mencapai 60 persen dari PDB.

Sebagaimana kita ketahui bersama, peningkatan jumlah utang tak lepas dari kebutuhan pembiayaan meningkat cukup pesat sebagai dampak dari kebutuhan belanja APBN selama pandemi mulai tahun 2020. Pelebaran defisit merupakan kebijakan yang diambil oleh hampir semua negara agar ekonomi tetap terjaga. Akibat pandemi, ekonomi tidak bergerak karena adanya kebijakan PPKM di Indonesia dan *Lockdown* di sebagian negara sehingga untuk membiayai kegiatan termasuk untuk perlindungan sosial sehingga pembiayaan menjadi tulang punggung akibat penerimaan negara tidak mencapai target. Hal tersebut berdampak pada kenaikan rasio utang terhadap PDB.

Pada 2020-2021 kenaikan rasio utang di Indonesia mencapai 10,8 persen. Secara presentase kenaikan rasio utang tersebut terlihat relatif tinggi., namun peningkatan tersebut sebenarnya relatif rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti, Thailand 17 persen, Filipina 22,1 persen, China 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen dan India 16,5 persen dalam periode yang sama.

Meskipun rasio utang lebih rendah dibandingkan negara sejawat, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 89,04 persen dari seluruh komposisi utang akhir September 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,86 persen. Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti BI, sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 18 Oktober 2022 mencapai 14,09 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita